

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING



**STRATEGI PERLUASAN AKSES PEREMPUAN
TERHADAP PENDIDIKAN MENENGAH
DI SUMATERA BARAT**

Oleh :

Drs. Suryanef, M.Si.
NIDN 0006066407

Dra. Maria Montessori, M. Ed., M.Si.
NIDN 0002026011

DIBIYAI OLEH
DIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
SESUAI DENGAN SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN
PENELITIAN DESENTRALISASI HIBAH BERSAING TA 2012
NOMOR : 096/UN35.2/PG/2012
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DESEMBER 2012

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL :	17 April 2014
SUMBER/HARGA :	HD
KOLEKSI :	F1
NO. INVENTARIS :	794/HD/2014-S ₁ (1)
KLASIFIKASI :	

PENGANTAR

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul *Strategi Perluasan Akses Perempuan Terhadap Pendidikan Menengah di Sumatera Barat* sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Desentralisasi Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2012 Nomor: 096/UN35.2/PG/2012 Tanggal 29 Februari 2012.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

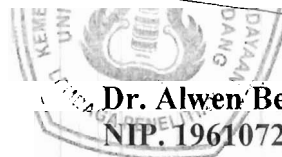
Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, serta telah diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Kemendiknas yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian tahun 2012. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang baik dari DP2M, penelitian ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga hal yang demikian akan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2012

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,



Dr. Alwen Bentri, M.Pd.

NIP. 19610722 198602 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul Penelitian : Strategi Perluasan Akses Perempuan Terhadap Pendidikan Menengah di Sumatera Barat.

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Drs. Suryanef, M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki.
- c. NIP : 19640606 1991 03 1 006..
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala.
- e. Jabatan Struktural : -----
- f. Bidang Keahlian : Ilmu Politik.
- g. Fakultas/Jurusan : Ilmu-ilmu Sosial/Ilmu Sosial Politik.
- h. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang.
- i. Tim Peneliti

No.	N a m a	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Dra. Maria Montessori, M.Ed., M. Si.	Ilmu Pendidikan dan Sosiologi.	Ilmu-ilmu Sosial/ISP	Univ. Negeri Padang.

3. Pendanaan dan jangka waktu penelitian :

- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 2 tahun.
- b. Biaya total yang diusulkan : Rp. 92.000.000,-
- c. Biaya yang disetujui tahun I (2012) : Rp. 40.000.000,-

Padang, Desember 2012.

Ketua Peneliti

Drs. Suryanef, M.Si.
NIP. 19640606 1991 03 1 006.

Mengetahui,
Dekan FIS Univ. Negeri Padang,



Prof. Dr. Syaifuddin Ahwar, M. Pd.
NIP. 19621001 1989 03 1 002.

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang,



Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 19610722 198602 1 002

RINGKASAN

Penelitian ini dirancang pelaksanaannya dalam dua tahun, dengan sasaran akhir adalah : (1) menghasilkan rumusan strategi dan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah ; (2) melakukan sosialisasi strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten/kota terpilih. Dalam upaya pencapaian sasaran akhir tersebut, maka penelitian tahun pertama memfokuskan diri kepada tiga hal yaitu : (1) memetakan strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah ; (2) menganalisis berbagai strategi perluasan akses yang dilakukan oleh tripartit dan relevansinya dengan kebijakan terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan menengah ; dan (3) menghasilkan strategi dan rumusan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat.

Untuk mengkaji fokus penelitian tersebut, maka kajian literatur yang dilakukan mengelaborasi hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan, urgensi perluasan akses perempuan dalam pendidikan, kebijakan-kebijakan nasional dan internasional tentang keadilan gender dalam pendidikan, program-program pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, serta hal-hal yang relevan dengan strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah.

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dan Kabupaten Limapuluh Kota dengan informan pihak sekolah, masyarakat/keluarga, dan pemerintah daerah (dinas pendidikan kabupaten/kota dan UPT Kecamatan).

Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan sekolah cenderung netral gender dan tidak ada kebijakan afirmasi yang diberlakukan bagi perluasan akses perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Kebijakan sekolah yang cenderung netral gender berdampak pada perolehan manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (laki-laki biasanya mendapatkan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan).
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga/masyarakat, sekolah, ataupun pemerintah untuk perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah

masih dilakukan secara parsial. Untuk itu perlu sinergisitas dalam menyusun kebijakan strategis yang melibatkan tripartit, dimana pemerintah daerah berperan sebagai inisiator kebijakan.

3. Kebijakan strategis yang perlu dilakukan dengan melibatkan sinergisitas tripartit pendidikan, antara lain sosialisasi terpadu tentang perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah, menginisiasi kebijakan yang komprehensif antara pihak sekolah, keluarga/masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai *blue print* bagi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah dan melakukan program monitoring dan evaluasi terhadap tindakan afirmasi yang telah disusun oleh tripartit tersebut.

SUMMARY

The study was designed within two years, with the final goals are: (1) Generating the alternative formulation of strategies and policies in expanding women's access to secondary education, (2) Dissemination the strategy of expanding women's access to secondary education at the Department of Education, the provincial and district / selected cities. In efforts to achieve the ultimate goal, then the first year of the study was focused on three things: (1) Mapping the strategy of expanding women's access by the family / community, schools and local governments, (2) Analyzing various strategies undertaken by tripartite and its relevance to policy in expanding women's access to secondary education, and (3) Generating the strategies and the formulation of alternatives policy in expanding women's access to secondary education in West Sumatra.

To study the research focus, the conducted literature review elaborated matters relating to gender equality and equity in education, the urgency of expanding women's access to education, national policies and international gender equity in education, women's empowerment programs in the field of education and other matters relevant to the strategy of expanding women's access to secondary education.

The research was conducted in Padang and the District of Fifty Cities with informants from the school, community / family, and local government (district education offices / city and district UPT).

The results of the research showed the following :

1. School policies tend to be gender neutral and there is no affirmation policy in place for the expansion of access of women to continue their education to a higher level or college. School policies tend to be gender neutral impact on the acquisition of benefits differ between men and women (men usually get higher benefits than women).
2. The efforts made by the family / community, school, or government for the expansion of women's access to secondary education was done partially. For that we need synergy in developing strategic policy involving tripartite, in which the government acts as an initiator of policy.
3. Strategic policy that needs to be done with the involvement of tripartite synergy of education, including socialization integrated on expanding

women's access to secondary education, initiated a comprehensive policy between the school, family / community, and local governments as a blueprint for the expansion of women's access to secondary education and do program monitoring and evaluation of affirmative action that has been prepared by the tripartite.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (*equity*) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas.

Untuk itu berbagai regulasi telah diciptakan, mulai dari pasal 31 UUD 1945 yang tidak membedakan hak untuk mengenyam pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan sampai kepada Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kesemua regulasi tersebut memberikan jaminan hukum bagi persamaan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Namun dalam realitasnya, statistik gender secara nasional maupun lokal menggambarkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya angka buta huruf, angka putus sekolah, dan menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dialami perempuan.

Di Sumatera Barat berdasarkan buku profil statistik dan indikator gender Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, terlihat bahwa selama kurun waktu 1996 – 2000 persentase penduduk perempuan berumur 10 – 44 tahun yang buta huruf relatif lebih besar dibanding laki-laki. Demikian juga dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tampak bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit jumlah perempuan

yang dapat menamatkan pendidikan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kata lain akses perempuan untuk menjangkau/menamatkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi perlu mendapatkan perhatian.

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan telah menjadi kebijakan utama di beberapa negara berkembang selama lebih dari tiga dekade terakhir ini, termasuk Negara Indonesia. Jika dirunut ke belakang, perbincangan tentang pendidikan perempuan telah dimulai sejak tahun 1970 sejalan dengan lahirnya kritik di kalangan feminis terhadap model pembangunan yang merugikan perempuan. Kritik yang dilancarkan kaum feminis dunia tersebut, pada akhirnya melahirkan rekomendasi akan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Lima tahun kemudian diselenggarakan Konferensi Dunia I tentang perempuan di Mexico City pada tahun 1975 yang secara tegas merekomendasikan kepada seluruh negara anggota agar diberi kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi perempuan (Ihromi, 2000). Konferensi Dunia IV tentang perempuan yang berlangsung di Beijing tahun 1995 pada akhirnya menetapkan rencana program aksi di 12 bidang kritis, yang diantaranya adalah tentang perempuan dan pendidikan.

Di Indonesia secara normatif, negara telah mengambil peran penting untuk memajukan perempuan di segala bidang sebagaimana tertera dalam pasal 28c ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta budaya serta meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Landasan hukum lain yang memastikan terciptanya kesetaraan gender adalah UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan, program dan kelembagaan termasuk bidang pendidikan. Lebih khusus lagi UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah membuat beberapa paradigma baru yang lebih memberi kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

Rangkaian kebijakan pendidikan yang responsif tersebut ternyata tidak memberikan kesetaraan dan keadilan dalam tataran empiris. Menurut Arivia (2002) persoalannya adalah dalam pelaksanaannya ternyata pendidikan bukanlah sesuatu yang bebas nilai, karena ia merupakan produk konstruksi sosial. Terlebih-lebih ada jenis kelamin dalam masyarakat yaitu perempuan yang tidak selalu diuntungkan akibat konstruksi sosial tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan lembaga sosial yang amat penting dalam membentuk dan kemudian memposisikan individu laki-laki dan perempuan pada golongan dan strata tertentu dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cenderung menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk ketidakadilan.

Statistik gender secara nasional menggambarkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Supriandi, dkk. (2001) dalam buku Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia menyebutkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) terlihat dominan rendah dalam usia 12 -18 tahun, sedangkan persentase perempuan yang buta huruf dua kali lebih besar dari laki-laki (13,85% dan 6,26%). Sementara jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan yang tidak menamatkan pendidikan dua kali lebih banyak bila dibandingkan dengan laki-laki yaitu 13,32% untuk

perempuan dan 5,96% untuk laki-laki. Pendapat senada dikemukakan oleh Arivia (2002), rata-rata angka masuk sekolah perempuan adalah 49,18% sedangkan laki-laki 50,82% di tingkat sekolah dasar. Untuk tingkat SLTP angka masuk siswa perempuan turun menjadi 46,43% sedangkan laki-laki menjadi 53,56%. Sementara di tingkat SLTA angka masuk perempuan mencapai 41,45% sedangkan laki-laki 58,55%. Di perguruan tinggi, rata-rata angka masuk perempuan hanya 33,36%, sedangkan laki-laki 66,44%. Dengan demikian, angka-angka statistik partisipasi bersekolah masyarakat tersebut menunjukkan makin tinggi tingkat jenjang pendidikan maka makin rendah akses perempuan terhadap pendidikan.

Di Sumatera Barat berdasarkan profil statistik dan indikator gender Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, terlihat bahwa selama kurun waktu 1996 – 2000 juga memperkuat kenyataan bahwa rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan apabila dibandingkan dengan laki-laki. Indikator lain yang dapat menggambarkan perluasan akses dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan adalah gambaran siswa putus sekolah (angka putus sekolah). Tabel berikut akan mengungkapkan jumlah siswa putus sekolah di Sumatera Barat untuk tahun ajaran 2006/2007.

Tabel 1 : Jumlah Siswa Putus Sekolah di Sumatera Barat Tahun Ajaran 2006/2007.

No.	Kabupaten/Kota	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
1.	Kab. Agam	142	1	192	69	130	13	41
2.	Kab. Pasaman	145	7	130	0	71	11	52
3.	Kab. Limapuluh Kota	242	2	258	33	127	18	23
4.	Kab. Solok	311	7	263	42	70	31	15
5.	Kab. Pariaman	197	0	304	18	86	18	63
6.	Kab. Pesisir Selatan	93	2	230	17	190	0	60
7.	Kab. Tanah Datar	176	0	142	84	136	29	49
8.	Kab. Swl/Sijunjung	131	0	127	22	77	0	41
9.	Kab. Mentawai	104	0	6	0	106	3	0
10.	Kab. Pasaman Barat	263	10	160	97	46	39	0
11.	Kab. Solok Selatan	47	0	18	5	12	0	15
12.	Kab. Dhamasraya	94	0	113	26	33	3	39
13.	Kota Bukittinggi	6	0	30	0	28	8	92
14.	Kota Padang	31	8	212	13	151	1	268
15.	Kota Padang Panjang	6	0	41	2	18	2	36
16.	Kota Sawahlunto	4	0	49	8	5	0	11
17.	Kota Solok	30	0	28	0	20	0	78
18.	Kota Payakumbuh	44	0	113	0	6	31	217
19.	Kota Pariaman	19	10	44	15	0	0	33
J u m l a h		2.085	47	2.460	451	1.312	207	1.133

Sumber : Data Statistik Subdin Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, 2008.

Dari data pada tabel 1 dapat dipahami bahwa : *Pertama*, kesempatan untuk memperoleh akses dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan ternyata belum merata menjangkau semua lapisan masyarakat yang menyebar pada daerah kota dan desa. Hal ini ditandai dengan jumlah siswa putus sekolah bervariasi pada masing-masing daerah. *Kedua*, jumlah siswa putus sekolah SMP dan sederajat ternyata lebih tinggi (dominan) bila dibandingkan dengan SD dan SMA. Hal ini berindikasi rendahnya akses siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Fenomena kesenjangan gender di bidang pendidikan sebagaimana terungkap sebelumnya, perlu segera mendapatkan upaya perbaikan yang komprehensif. Untuk itu penelitian ini penting dilakukan terlebih mengingat pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGs)* tahun 2015 diharapkan dapat mencapai tujuan. Satu diantara berbagai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diteliti strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah, maupun pemerintah daerah.

B. Perumusan Masalah.

Permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah?
2. Bagaimanakah relevansi strategi perluasan akses yang dilakukan oleh tripartit dengan kebijakan terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan menengah?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan dalam suatu bangsa memegang peranan yang cukup penting. Perkembangan dan kemajuan sumberdaya pada suatu negara sangat bergantung pada hasil pendidikan yang memberikan kesempatan pada perkembangan manusia secara utuh (Tilaar, 1999). Dalam rangka membentuk manusia yang utuh, pendidikan di Indonesia hendaknya berupaya menjunjung tinggi adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama sebagai manusia dan mewujudkan kemampuannya untuk berperan aktif dalam pembangunan. Sementara itu keadilan gender merupakan proses yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Supaya proses untuk menjadi adil terwujud, diperlukan banyak langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara sosial dan menurut sejarah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkan. Keadilan gender dalam pendidikan secara tegas dicantumkan ke dalam Deklarasi Beijing tahun 1996 bahwa : "pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan, perkembangan dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (*equity*) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas." hal senada juga dapat ditemui dalam kebijakan pendidikan untuk semua (*educational for all*) yang telah disepakati di Dakar Singal. Beberapa isi dari kesepakatan tersebut berkaitan dengan pendidikan dan kesetaraan gender yakni : *Pertama*, menjamin bahwa menjelang 2015 semua anak khususnya perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk

etnik minoritas, mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik. *Kedua*, mencapai perbaikan 50% pada tingkat *literary* orang dewasa menjelang tahun 2015 terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. *Ketiga*, menghapus disparitis gender di bidang pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2015 dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan yang berkualitas (Depdiknas, 2003).

Penelitian Suryadi (dalam Sukes, 2002) menyebutkan ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain dari gejala berbedanya akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, rendahnya angka partisipasi perempuan pada setiap studi, dan akses bagi partisipasi perempuan terhadap jurusan, ilmu dasar seperti fisika, kimia biologi dan teknologi industri masih rendah. Penelitian yang lebih intens tentang bias gender dalam pendidikan oleh Muthali'in (2001) yang secara umum menyimpulkan bias gender di sekolah tidak hanya ditemukan dalam proses pembelajaran (seperti buku pelajaran, media dan metoda, komponen-komponen proses belajar mengajar) tetapi juga tercermin dalam sistem sosial yang berlangsung di sekolah. Hal senada juga dikemukakan Fadhil (2002) yang menyebutkan bahwa dalam 210 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, 50,3% diantaranya perempuan dan dari jumlah tersebut, 65% berada pada usia produktif (15 – 60 tahun). Namun angka statistik secara umum menonjolkan bahwa kaum perempuan mendapat posisi yang kurang menguntungkan terutama dalam bidang pendidikan.

Bias gender dalam pendidikan ternyata merugikan satu peran gender yaitu perempuan. Padahal menurut Moore (1996) bila ditinjau dari teori fungsional peran

sekolah dapat meningkatkan modal sosial laki-laki dan perempuan. Ternyata peningkatan modal sosial antara perempuan dan laki-laki tidak mengalami persamaan. Demikian juga dengan teori konflik. Berdasarkan teori ini direkomendasikan bahwa isi kurikulum mengandung bias kultural yang kadangkala mendistorsi perempuan dan dimensi-dimensi kehidupan yang penting buat perempuan. Di sisi lain dapat dijelaskan bahwa paling tidak ada tiga macam paradigma yang biasa mewarnai gerak langkah lembaga pendidikan. *Pertama*, paradigma konservatif yang menyebutkan ketidaksetaraan merupakan hukum alam dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari. Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius. Menurut paradigma ini menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari kesalahan mereka sendiri karena kelalaian mereka untuk belajar dan bekerja keras. *Kedua*, paradigma liberal yang menganggap bahwa persoalan ekonomi politik tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, pengadaan laboratorium atau komputer dan sebagainya, yang secara umum terisolasi dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya, dan represi politik yang ada dalam masyarakat. Pendidikan justru berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan, dan memproduksi nilai-nilai tata susila agar berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada umumnya membangun kesadaran dimana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau *given*, dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan (Fakih dalam O'Neil, 2001). *Ketiga*, paradigma kritis yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan

politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara fundamental di dalam masyarakat. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Untuk itu urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap ideologi yang dominan ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidik adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Paradigma ini mengadopsi kesadaran kritis dengan cara melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketidakadilan yang mengejowantah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja serta bagaimana mentransformasikannya.

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah dirasakan urgensinya demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Untuk itu pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan harus dilakukan secara simultan agar perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan merupakan respon yang dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran pada skala obyektif terhadap eksistensi diri, posisi, dan juga masa depan individu ataupun kelompok. Oleh Fakih (1996) dikatakan bahwa pemberdayaan dianggap sebagai jalan yang penting menuju suatu perubahan. Lerman dan Porter (1990), Worrel dan Remer (1992) serta MacDonald (1993) mengemukakan pandangannya bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan kerangka proses : (1) individu dapat mengidentifikasi dan menyadari situasinya, dan alternatif-alternatif penyelesaian masalahnya ; (2) individu memiliki kekuatan-kekuatan personal untuk mengatasi dan mengendalikan situasi secara tidak langsung dan selanjutnya secara langsung ; dan (3) individu memiliki keberanian dan keterampilan untuk menghadapi

- b. Penyiapan lingkungan yang lebih kondusif untuk kesetaraan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki.
- c. Pengembangan kebijakan pendidikan yang berperspektif gender.
- d. Pengarusutamaan gender dalam tingkat partisipasi, kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, dan pelaku pendidikan.
- e. Penyediaan sistem dukungan sosial bagi peningkatan kesempatan anak perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta kejuruan.
- f. Peningkatan pengetahuan perempuan mengenai penerapan teknologi tepat guna yang berperspektif gender.

Upaya perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah memerlukan kerjasama ketiga lingkungan (tripartit) yaitu lingkungan keluarga/masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan pemerintah daerah. Dari segi lingkungan keluarga/ masyarakat dapat dilihat melalui dukungan, kontribusi yang diberikan dan kontrol sosial masyarakat. Iklim ekonomi yang tidak memungkinkan sebuah keluarga menyekolahkan anaknya mengakibatkan mereka memprioritaskan laki-laki untuk sekolah jika dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan sikap sosial selalu membentuk stereotipe bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena tugas utamanya adalah mengurus pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami.

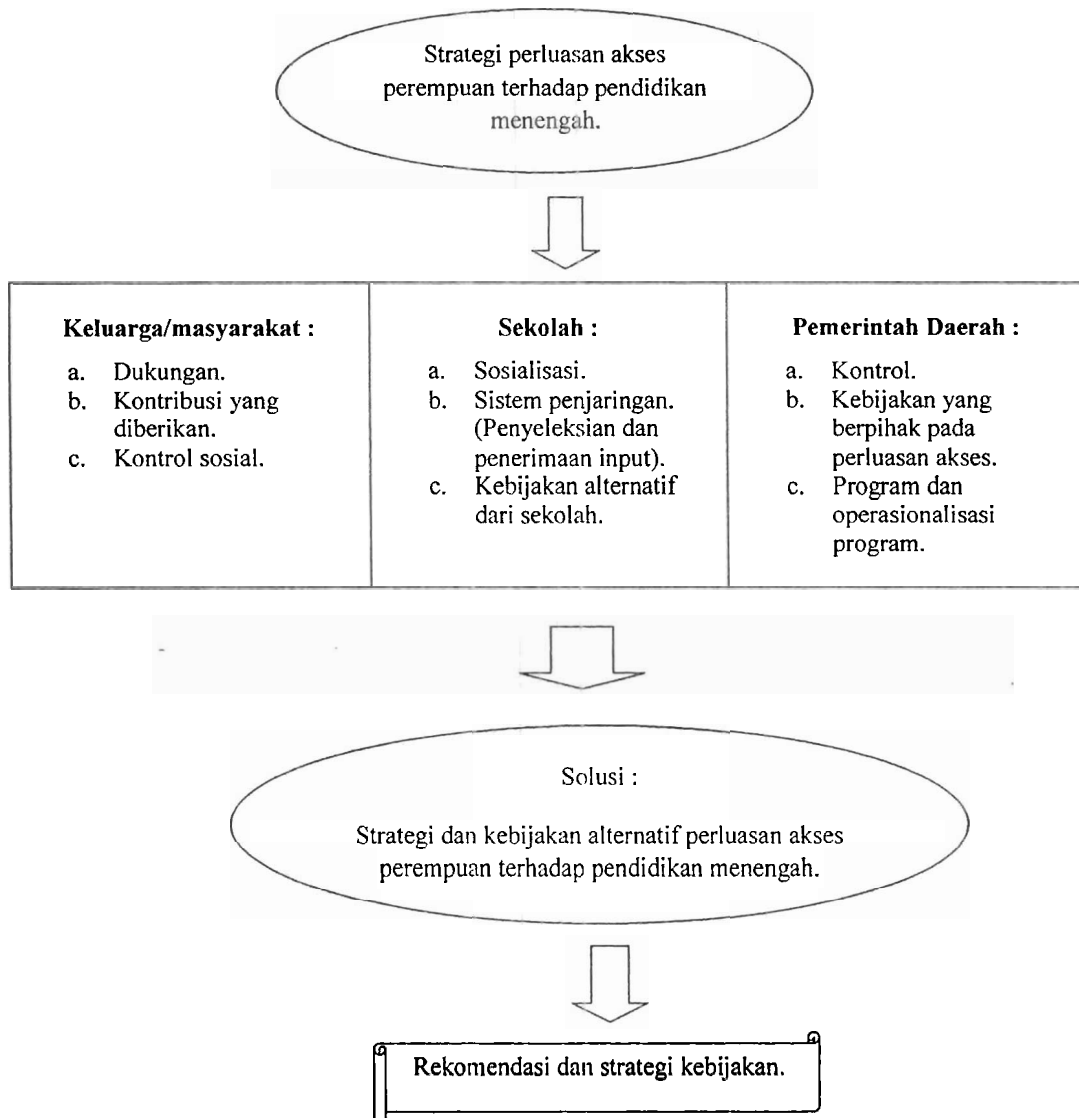
Kemudian upaya dari lingkungan sekolah menyangkut bagaimana bentuk sosialisasi, sistem penjangkauan, penyeleksian dan penerimaan input, maupun kebijakan-kebijakan alternatif yang ditawarkan. Sementara itu dari segi pemerintah

daerah menyangkut kontrol pemerintah melalui kebijakan, program-program, maupun operasionalisasi di lapangan.

Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang sensitif gender tentunya akan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan. Beberapa kebijakan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan yang memastikan akses pendidikan, dalam pengertian melindungi perempuan dari diskriminasi pendidikan. Beberapa hal terkait dengan ini adanya bantuan finansial bagi yang membutuhkan, tidak mengalami proses pendidikan yang stereotip, serta penyediaan fasilitas yang memadai termasuk kualitas pengajar yang berperspektif gender.
- b. Kebijakan yang memperhatikan adanya persoalan budaya patriarki, yaitu pemberian sanksi terhadap institusi-institusi pendidikan yang mempraktekkan diskriminasi terhadap perempuan.
- c. Kebijakan yang berpihak pada ekonomi lemah, dalam kaitan ini memastikan akses pendidikan untuk semua golongan bahkan memperjuangkan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan menengah. Disamping itu sekolah swasta yang melayani keluarga mampu harus menyediakan proporsi tertentu dari keluarga yang tidak mampu.
- d. Kebijakan yang memperhatikan kurikulum dan teks-teks sekolah. Kebijakan ini memberi penekanan pada upaya untuk menghindari kurikulum yang bias gender, bahkan mewajibkan pendidikan gender di dalam setiap tingkat pendidikan.

Berkaitan dengan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut :



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memetakan strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah.
2. Menganalisis berbagai strategi perluasan akses yang dilakukan oleh tripartit dan relevansinya dengan kebijakan terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan menengah.
3. Menghasilkan strategi dan rumusan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat.

B. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan input kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat dalam memperluas akses perempuan terhadap pendidikan menengah.
2. Membangun kepedulian sekolah dalam menerapkan pendidikan yang sensitif gender.
3. Memberikan kontribusi terhadap upaya mewujudkan keadilan gender dalam bidang pendidikan.

BAB IV METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*) dan tuntas (*exhaustive*) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Singarimbun (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba memahami gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial tertentu, dalam konteks ini fenomena pendidikan dan gender. Sedangkan Vredenberg (1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan realitas sosial yang komplis dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya jenis penelitian ini berusaha menjawab apa penjelasan terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian.

Disamping itu juga digunakan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development = R & D*), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010). Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk berupa rekomendasi kebijakan baru tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain produk sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya.

Informan penelitian ini terdiri dari kalangan keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah. Untuk kalangan keluarga/masyarakat dipilih menggunakan teknik *snowball sampling* (Bogdan dan Biklen, (1998) ; Moleong (2000)). Sementara informan penelitian dari kalangan sekolah dan pemerintah daerah dipilih secara

purposive. Sedangkan pemilihan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan perolehan data dalam mencermati perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah, khususnya terkait dengan perimbangan jumlah siswa laki-laki dengan perempuan. Disamping itu juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat seperti ekonomi dan budaya. Berdasarkan hal tersebut, maka lokasi penelitian ditetapkan satu kabupaten dan satu kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sementara itu sekolah yang menjadi sampel adalah : (1) SMK Negeri 5 Padang ; (2) SMA Negeri 2 Padang ; (3) SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh ; dan (4) SMA Negeri Kecamatan Guguk.

Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) wawancara mendalam (*depth interview*) menggunakan pedoman wawancara ; dan (2) studi dokumentasi dengan menggunakan lembaran pencatat. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk matriks berikut :

No.	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah dalam perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah.	a. Keluarga/masyarakat. b. Sekolah (guru, kepala sekolah, siswa, dan komite sekolah. c. Pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dan UPTD Pendidikan Kecamatan).	Wawancara dan studi dokumentasi.	Pedoman wawancara dan lembaran pencatat.
2.	Strategi dan kebijakan alternatif bagi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah.	a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan UPTD Pendidikan Kecamatan. b. Masyarakat. c. Sekolah. d. Siswa.	Wawancara.	Pedoman wawancara.

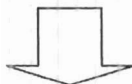
Data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi yang merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dan jawaban (Vredenberg, 1979). Penafsiran dan interpretasi data merupakan proses pemberian makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang digunakan dalam analisis data penelitian ini berpedoman kepada apa yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Reduksi data. Data yang terkumpul direduksi guna menajamkan analisis, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat sesuatu kesimpulan yang bermakna.
- b. Penyajian data, yang merupakan proses penggambaran dari keseluruhan kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga peneliti dapat memahami jawaban dari permasalahan yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dan diolah kemudian disimpulkan sesuai dengan klasifikasi data menuju suatu konfigurasi yang utuh. Jika terjadi kekurangan data atau kesalahan data yang diambil, maka dapat dilakukan proses ulang dengan tahapan yang sama.

Kemudian dari segi alur penelitian setiap tahunnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun I (40%) :

1. Memetakan strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah.
2. Menganalisis berbagai strategi perluasan akses yang dilakukan oleh tripartit dan relevansinya dengan kebijakan terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan menengah.
3. Menghasilkan strategi dan rumusan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat.



Tahun II (60%)

1. Melakukan sosialisasi strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Melakukan analisis kritis bersama dengan pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan untuk merumuskan alternatif strategi dan kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah.
3. Menghasilkan rumusan strategi dan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian.

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu Kota Padang dan Kabupaten Limapuluh Kota, khususnya terkait dengan persoalan pendidikannya.

1. Kota Padang.

Kota Padang dalam hal pendidikan mempunyai visi, terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia, melalui sistem pendidikan yang kondusif. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan terkait dengan hal-hal sebagai berikut : (1) meningkatkan proses dan pencapaian kualitas pendidikan melalui upaya penyebaran pendidikan yang berkualitas dan berakhlak mulia ; (2) meningkatkan percepatan dan pencapaian hasil pembelajaran ; dan (3) meningkatkan proses pengembangan kualitas intelektual masyarakat.

Sementara itu beberapa kebijakan Kota Padang dalam bidang pendidikan mencakup hal sebagai berikut : (1) meningkatkan mutu pendidikan dengan target kinerja hasil Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN) peringkat delapan tingkat Provinsi Sumatera Barat ; (2) melanjutkan kegiatan keagamaan, berupa pesantren Ramadhan, didikan shubuh, dan shalat berjamaah di sekolah ; (3) rekonstruksi mental dan kejiwaan siswa serta rekonstruksi gedung, serta prasarana pendidikan pasca gempa bumi 30 September 2009 ; dan (4) pemerataan kesempatan pendidikan melalui Penerimaan Siswa Baru (PSB) on-line.

Sehubungan dengan pengimplementasian kebijakan di bidang pendidikan tersebut, untuk pendidikan menengah Kota Padang didukung 76 sekolah baik negeri

maupun swasta yang tersebar pada 11 kecamatan. Secara rinci distribusi sekolah tersebut menurut kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Distribusi Sekolah Menengah Menurut Kecamatan di Kota Padang Tahun 2012.

No.	Kecamatan	Jumlah SMA Negeri	Jumlah SMA Swasta	Jumlah SMK Negeri	Jumlah SMK Swasta	Jumlah Total
1.	Kecamatan Bungus.	1	0	0	0	1
2.	Kecamatan Lubuk Kilangan.	1	0	0	3	4
3.	Kecamatan Lubuk Begalung.	1	1	3	1	6
4.	Kecamatan Padang Selatan.	0	12	0	9	21
5.	Kecamatan Padang Timur.	1	2	3	2	8
6.	Kecamatan Padang Barat.	1	5	1	0	7
7.	Kecamatan Padang Utara.	4	1	1	5	11
8.	Kecamatan Nanggalo.	1	2	0	2	5
9.	Kecamatan Kuranji.	1	3	1	0	5
10.	Kecamatan Pauh.	2	0	1	0	3
11.	Kecamatan Koto Tangah.	3	1	0	1	5
Jumlah Total		16	27	10	23	76

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang, 2011.

Selanjutnya jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Padang adalah 23.679 orang, dengan rata-rata siswa per-sekolah sejumlah 482 orang. Adapun jumlah rombongan belajar (rombel)-nya 1.035. Secara rinci kondisi ini terangkum pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Jumlah Siswa Pada Sekolah Menengah Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Padang Tahun 2012.

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa		Jumlah Total	Jumlah Rombel
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Kecamatan Bungus.	201	297	498	22
2.	Kecamatan Lubuk Kilangan.	724	874	1.598	90
3.	Kecamatan Lubuk Begalung.	650	639	1.289	61
4.	Kecamatan Padang Selatan.	736	671	1.407	75
5.	Kecamatan Padang Timur.	1.722	1.964	3.686	161
6.	Kecamatan Padang Barat.	2.438	2.970	5.408	190
7.	Kecamatan Padang Utara.	1.262	1.752	3.014	111
8.	Kecamatan Nanggalo.	345	380	725	54
9.	Kecamatan Kuranji.	887	973	1.860	81
10.	Kecamatan Pauh.	729	1.032	1.761	77
11.	Kecamatan Koto Tengah.	1.061	1.372	2.433	113
Jumlah Total		10.755	12.924	23.679	1.035

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang, 2011.

Sementara itu untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jumlah siswa keseluruhan adalah 14.812 orang dengan jumlah rata-rata per-sekolah 370 orang dengan jumlah rombel 519. Secara rinci distribusinya diungkapkan oleh tabel berikut :

Tabel 4
Jumlah Siswa Pada Sekolah Menengah Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Padang Tahun 2012.

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa		Jumlah Total	Jumlah Rombel
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Kecamatan Lubuk Kilangan.	368	3	371	11
2.	Kecamatan Lubuk Begalung.	750	817	1.567	72
3.	Kecamatan Padang Selatan.	74	94	168	9
4.	Kecamatan Padang Timur.	2.120	2.616	4.736	141
5.	Kecamatan Padang Barat.	1.235	2.117	3.352	185
6.	Kecamatan Padang Utara.	1.986	32	2.018	69
7.	Kecamatan Nanggalo.	174	96	270	12
8.	Kecamatan Kuranji.	1.117	15	1.132	44
9.	Kecamatan Pauh.	218	365	583	14
10.	Kecamatan Koto Tengah.	464	156	620	22
Jumlah Total		8.517	6.295	14.812	519

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang, 2011.

Adapun sekolah yang menjadi pilihan untuk dijadikan sampel di Kota Padang adalah SMA Negeri 2 Padang dan SMK Negeri 5 Padang. Berikut ini akan dideskripsikan profil kedua sekolah tersebut.

SMA Negeri 2 Padang terletak di pusat Kota Padang, tepatnya di Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat. Secara geografis, SMA Negeri 2 Padang terletak di kawasan strategis karena terletak di tengah-tengah lingkaran gerbang kawasan eksekutif. Lokasi gedung SMA Negeri 2 Padang sangat memadai ditata dan dikembangkan menjadi SMA modern tingkat provinsi/nasional karena luasnya \pm 18.650 m², jauh dari kebisingan, sejuk, dan nyaman untuk lokasi pendidikan.

Adapun visi sekolah ini adalah bertaqwa, berbudaya, cerdas, kompetitif dan inovatif, dan peduli lingkungan. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan output peserta didik yang mampu maju berkelanjutan dengan jati diri beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berbudi pekerti tulus, berdisiplin, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang ditopang oleh jasmani dan rohani.
- b. Mengantarkan output peserta didik ke PTN dengan persentase minimal 68%.
- c. Mengantarkan peserta didik berpotensi khusus yang berkeinginan ke perguruan tinggi luar negeri.
- d. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan siswa berbakat.
- e. Membekali peserta didik tertentu dengan pengetahuan vokasional sebagai modal dasar untuk terjun ke masyarakat.
- f. Meningkatkan pengembangan staf berdasarkan sistem yang mapan dengan acuan keilmuan dan profesional.
- g. Membudayakan sistem manajemen *network* yang solid berdasarkan acuan konsep MPMBS dan *TQM (Total Quality Management)*.
- h. Selalu meningkatkan kinerja sekolah melalui perbaikan peningkatan dan pengembangan kualitas proses pendidikan.

- i. Mewujudkan lingkungan belajar yang indah, tertib dan sejuk.
- j. Mewujudkan sekolah sehat, bersih dan rapi.
- k. Mewujudkan pusat sumber belajar yang representatif dan inovatif.

Jumlah peserta didik SMA Negeri 2 Padang pada tahun 2011/2012 adalah 793 orang.

Sementara itu SMK Negeri 5 Padang terletak di Jalan Beringin No.4 Lolong Padang, dengan luas tanahnya 11.672m² dan luas bangunannya 7.358m². SMK Negeri 5 Padang dahulunya bernama Sekolah Teknologi (STM) Negeri 2 Padang. Sekolah ini memiliki visi : cerdas, kompetitif, dan berbudi luhur.

Adapun misi yang diemban sekolah ini adalah :

- a. Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas intelektual, emosional, dan spiritual.
- b. Membekali lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tantangan global.
- c. Mewujudkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- d. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat yang berkesinambungan.
- e. Mewujudkan budaya dan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan kondusif untuk pembelajaran.
- f. Meningkatkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008.
- g. Menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sekolah berbasis teknologi informasi.

SMK Negeri 5 Padang memiliki 5 program studi (Prodi) keahlian dengan masing-masing kompetensi tamatan. Kelima program studi tersebut yaitu : (1) Prodi Keahlian Teknik Bangunan ; (2) Teknik Elektronika ; (3) Teknik Ketenagalistrikan ;

(4) Teknik Permesinan ; dan (5) Teknik Otomotif. Jumlah siswa sekolah ini adalah 1.091 orang, dengan rincian 1.079 siswa laki-laki dan hanya 12 orang saja siswa perempuan. Sementara itu jumlah rombongan belajarnya 37, yang terdiri dari Kelas I 15 rombongan belajar, Kelas II 12 rombongan belajar, dan Kelas III 10 rombongan belajar.

2. Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal pendidikan yang dipimpin oleh Dinas Pendidikan mempunyai visi, terwujudnya masyarakat terdidik dan terpelajar yang berbudi, berakal, beriman dan terampil. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut oleh Dinas Pendidikan sebagai institusi pengelola pembangunan pendidikan dikongkritkan melalui misi sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan masyarakat.
- b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, budi pekerti masyarakat.
- c. Meningkatkan pemberdayaan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
- d. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui sekolah, rumah tangga.

Untuk mencapai hal tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pendidikan menengah didukung oleh 9 SMA Negeri dan SMA Swasta, serta 5 SMK, baik negeri maupun swasta dengan jumlah keseluruhan siswa 6.997 orang. Jumlah ini belum termasuk siswa yang berasal dari Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang berjumlah 712 orang (BPS, 2011). Secara rinci distribusi Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4

**Distribusi Sekolah Menengah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011.**

No.	Kecamatan	Jumlah SMA Negeri	Jumlah SMA Swasta	Jumlah SMK Negeri	Jumlah SMK Swasta	Jumlah Total
1.	Kecamatan Gunuang Omeh.	0	0	0	0	0
2.	Kecamatan Bukik Barisan.	0	0	0	0	0
3.	Kecamatan Suliki.	1	0	1	0	2
4.	Kecamatan Guguak.	1	0	1	0	2
5.	Kecamatan Mungka.	0	0	0	0	0
6.	Kecamatan Akabiluru.	1	0	0	0	1
7.	Kecamatan Payakumbuh.	1	0	0	1	2
8.	Kecamatan Luak.	0	0	1	0	1
9.	Kecamatan Lareh Sago Halaban	1	0	0	0	1
10.	Kecamatan Situjuah Limo Nagari.	1	0	0	0	1
11.	Kecamatan Harau.	1	0	0	0	1
12.	Pangkalan Koto Baru.	1	0	1	0	2
13.	Kapur IX.	1	0	0	0	1
Jumlah Total		9	0	4	1	14

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2011.

Adapun sekolah yang menjadi pilihan sebagai sampel di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh dan SMK Negeri I Kecamatan Guguak. Berikut ini akan dideskripsikan profil kedua sekolah tersebut.

SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh terletak di Jalan Payakumbuh – Mungka KM7 Koto Tangah Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekolah ini memiliki luas 9.950m² dan halaman beserta lapangan olah raga masing-masing 3.622m² dan 1.070m².

Visi sekolah ini yaitu beriman, berilmu, kreatif, dan inovatif. Untuk mewujudkan visi tersebut dikongkritkan melalui misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan iman dan taqwa.

- b. Menyempurnakan penyusunan silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- c. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada pengembangan potensi siswa yang efektif dan efisien.
- d. Mengaktifkan Lembaga Kerja Guru Mata Pelajaran (LKGMP) dalam rangka meningkatkan profesional guru.
- e. Menyusun kelompok belajar terbimbing dan mengaktifkan siswa dalam berdiskusi belajar mandiri.
- f. Melaksanakan kegiatan pengembangan kreatifitas siswa, sesuai bakat dan minatnya.
- g. Menerapkan manajemen demokratis dan melibatkan seluruh masyarakat agar dapat berpartisipasi.
- h. Mendorong semua warga sekolah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran dan administrasi sekolah.
- i. Meningkatkan komitmen seluruh tenaga pendidik dan kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Jumlah siswa di SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh ini adalah 445 siswa, yang terdiri dari 199 orang laki-laki dan 246 orang perempuan.

Sementara itu SMK Negeri 1 Kecamatan Guguak adalah SMK yang menyiapkan siswa sebagai tenaga kerja yang produktif dan mandiri. Visi sekolah ini adalah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu, unggul, kompetitif, dan komparatif berstandar nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visinya, sekolah ini memberikan layanan dan memfasilitasi siswa SMK Negeri 1 Kecamatan Guguak melalui misi berikut ini :

- a. Menumbuhkan penghayatan terhadap iman dan taqwa sebagai pedoman awal dalam bertindak.
- b. Mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan yang berwawasan mutu dan semangat keunggulan.
- c. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha dan dunia industri serta instansi terkait dan masyarakat dalam kebijaksanaan pengelolaan sistem pendidikan dan pelatihan.
- d. Mewujudkan layanan prima dalam upaya pemberdayaan sekolah dan masyarakat.
- e. Mengembangkan iklim kerja dan belajar yang berakar pada norma dan nilai budaya bangsa Indonesia.
- f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas pembinaan kesiswaan dalam mewujudkan iman dan taqwa dan sikap kemandirian.
- g. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan prinsip *demand driven*.
- h. Memberdayakan lingkungan sekolah dan mewujudkan wawasan Wiyata Mandala.

SMK Negeri I Kecamatan Guguk memiliki luas tanah 30.000m², dengan luas bangunan 6.330m² dan jumlah siswa 615 orang.

B. Temuan Khusus Penelitian.

Pada temuan khusus akan dideskripsikan dua hal yaitu : *Pertama*, strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah yang dilakukan pihak sekolah, keluarga/masyarakat, dan pemerintah. *Kedua*, relevansi strategi perluasan

akses yang dilakukan oleh tripartit dengan kebijakan perluasan akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan menengah.

1. Strategi Perluasan Akses Perempuan Terhadap Pendidikan Menengah.

Strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan menengah.

a. Upaya yang dilakukan oleh keluarga/masyarakat.

Pendidikan harus disadari bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sekolah yang bersangkutan, tetapi juga melibatkan peran dan tanggung jawab masyarakat. Terlebih dalam mengupayakan perluasan akses bagi perempuan bersekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan bagi anak perempuan untuk tetap bersekolah terlihat bervariasi pada lokasi penelitian. Pada sekolah yang berada di kota umumnya dukungan dari orang tua untuk anak perempuannya bersekolah telah nampak, berbeda dengan di desa-desa. Semakin tinggi pendidikan anak perempuan, semakin banyak harapan orang tua yang dibebankan di pundak anak perempuan. Anak perempuan diharapkan bisa menggantikan beban orang tua untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sementara mereka bekerja mencari nafkah.

Selain faktor ekonomi, dukungan orang tua terlihat rendah ketika faktor budaya turut mempengaruhi keputusan orang tua untuk menyekolahkan anak perempuannya atau memaksa mereka untuk kawin muda. Hambatan juga ditemui dari unsur budaya ketika banyak tradisi-tradisi adat yang memerlukan anak perempuan sehingga orang tua “memaksa” anak perempuannya untuk meninggalkan sekolah

sekadar mengikuti acara-acara adat di kampungnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang kepala sekolah yang berlokasi di desa, berikut ini :

“Pada acara-acara adat tertentu seperti batang balimau bakajang (membawa talam), orang tua menjemput anaknya dari sekolah dan dipaksa untuk mengikuti tradisi-tradisi adat tersebut. Hal ini tentu memberatkan bagi anak perempuan, belum lagi bila di kampung tertentu ada tradisi kawin di usia muda, maka orang tua akan merasa bangga bila anak perempuannya sudah dipinang. Kondisi-kondisi ini yang menyebabkan perempuan tidak melanjutkan sekolah lagi.”

Kenyataan di atas walaupun dari segi kuantitas tidak banyak, namun cukup menjadi perhatian bersama. Untuk itu strategi pertama yang harus dilakukan adalah menanamkan kesadaran pada orang tua/masyarakat akan arti penting pendidikan. Sosialisasi yang diberikan selama ini ternyata belum optimal. Perlu dilakukan upaya untuk merubah *mindset* (reorientasi pemikiran) bahwa sekolah merupakan tanggung jawab bersama.

Kemudian bila dilihat dari kontribusi orang tua/masyarakat terhadap sekolah, temuan penelitian menunjukkan umumnya kontribusi masyarakat terhadap sekolah cukup baik. Adanya komite sekolah pada setiap sekolah sampel mengisyaratkan terdapatnya kontribusi orang tua dalam mendukung layanan pendidikan di sekolah. Misalnya kondisi yang terdapat di SMA Negeri 2 Padang, di sini terdapat lima peran orang tua dalam pengembangan sekolah yaitu : (1) sebagai donatur dalam menunjang kegiatan dan sarana sekolah ; (2) mitra sekolah dalam pembinaan pendidikan ; (3) mitra dalam membimbing kegiatan peserta didik ; (4) mitra dialog dalam peningkatan kualitas pendidikan ; dan (5) sebagai sumber belajar.

Disamping kontribusi yang diberikan orang tua/masyarakat dalam bentuk komite sekolah, temuan penelitian juga mengungkapkan bervariasinya perhatian orang tua/masyarakat terhadap akses pendidikan anak perempuan mereka di sekolah.

Ada orang tua yang benar-benar memperhatikan dan mendukung seluruh program-program sekolah dan ada pula yang merasa tidak pernah menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Kenyataan ini sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang orang tua berikut ini :

“Bila ditanya tentang apa kontribusi yang saya sudah berikan terhadap sekolah hanyalah dalam bentuk formal, diberi surat ditanggapi, apa yang harus kami lakukan atas permintaan pihak sekolah, ya kami berikan. Namun terlepas dari itu, kami tidak pernah menjadi orang pertama yang menjalin komunikasi dengan pihak sekolah.”

Hal berikutnya yang diteliti berkaitan dengan upaya yang dilakukan keluarga/masyarakat adalah kontrol sosial. Dalam hal ini bagaimana keluarga/masyarakat melakukan pengawasan terhadap sikap sosial yang ada, yang selalu membentuk *stereotype* bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Bagaimana masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan, baik dari pemerintah maupun dari pihak sekolah yang tidak netral gender, dan bagaimana masyarakat mengawasi lingkungan agar kondusif bagi peningkatan akses perempuan/laki-laki untuk terus bersekolah ataupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di perkotaan sudah memiliki sensitifitas gender di bidang pendidikan. Ini terbukti mereka tidak membedakan akses atau kesempatan untuk bersekolah antara laki-laki ataupun perempuan. Walaupun demikian apabila ada pilihan untuk melanjutkan sekolah antara perempuan dan laki-laki di suatu keluarga, si anak perempuan selalu mengalah dengan sukarela karena di tahun berikutnya mereka bisa bersekolah. Kondisi ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tua di sekolah penelitian :

“Kami sekeluarga tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam bersekolah. Pengalaman tahun lalu anak perempuan kami dengan sukarela memberi dukungan pada saudaranya yang laki-laki untuk melanjutkan ke

perguruan tinggi terlebih dahulu karena masalah biaya. Dia tidak berkeberatan untuk tahun berikutnya kuliah.”

Temuan ini ternyata berbeda dengan kenyataan di pedesaan. Dari informan yang diwawancarai rata-rata mengungkapkan bahwa skala prioritas selalu diberikan kepada laki-laki karena faktor budaya yang mengharuskan laki-laki merantau dan menuntut ilmu. Untuk itu perlu dukungan dari keluarga inti ataupun keluarga besar bahwa perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama dalam pendidikan.

b. Upaya yang dilakukan sekolah.

Terdapat tiga hal yang dicermati dalam menemukan strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah dari upaya yang dilakukan pihak sekolah yaitu sosialisasi, sistem penjangkaran (penyeleksian dan penerimaan input), serta kebijakan alternatif dari sekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah umumnya mengadakan sosialisasi pada awal penerimaan siswa baru. Sosialisasi diarahkan kepada penyampaian program-program sekolah dan memberikan penyuluhan agar anak-anak yang masuk sesuai dengan minat awal siswa. Ketika ditanyakan lebih lanjut ternyata materi sosialisasi belum mengarah kepada peningkatan akses perempuan untuk bersekolah. Sosialisasi hanya diberikan secara umum tidak membedakan antara siswa perempuan dengan yang laki-laki. Hal lain juga terungkap dari lapangan bahwa pentingnya menanamkan *gender awareness* kepada seluruh warga sekolah sehingga iklim sekolah dapat lebih responsif gender.

Kemudian bila dilihat dari masalah sistem penjangkaran (penyeleksian dan penerimaan input), temuan penelitian menunjukkan bahwa dengan sistem penjangkaran *on-line* tidak banyak yang bisa dilakukan pihak sekolah. Ketentuan terkait dengan siswa yang akan diterima sudah ada dan tidak ada kuota khusus bagi perempuan.

Sekolah juga tidak memiliki kebijakan lain untuk penerimaan siswa baru selain sistem *on-line*.

Bila disigi lebih lanjut, sekolah juga ternyata tidak memiliki kebijakan-kebijakan khusus untuk membantu perempuan meningkatkan akses bersekolah. Tidak terdapat beasiswa khusus untuk perempuan, yang ada hanya beasiswa khusus bagi anak kurang mampu maupun anak yang berprestasi tanpa membedakan perempuan dan laki-laki.

Kebijakan sekolah cenderung netral gender sehingga berdampak pada perolehan manfaat yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki biasanya mendapatkan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dengan kondisi ini perlu alternatif kebijakan sekolah yang dipastikan tidak bias gender. Bila perlu sekolah merumuskan alternatif kebijakan tentang tindakan afirmasi dalam berbagai program sekolah agar kesetaraan dalam pendidikan tercapai.

c. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Secara umum pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan membangun visi yaitu terwujudnya sumberdaya manusia yang bertaqwa, berkualitas, kompetitif, kreatif, dan berkarakter. Salah satu misinya yang berhubungan dengan perluasan akses adalah meningkatkan rata-rata lama belajar dan keberlangsungan pendidikan.

Selanjutnya misi ini diterjemahkan ke dalam kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2011 – 2015, diantaranya kebijakan penjaminan keberlangsungan pendidikan SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK, kebijakan peningkatan *e-learning* bagi siswa SMA dan SMK, kebijakan penjaminan keberlangsungan pendidikan bagi siswa di Perguruan Tinggi Negeri ternama, serta percepatan peningkatan pendidikan

nonformal dan informal dalam rangka peningkatan program pemberantasan buta aksara/melek huruf fungsional, pendidikan kecakapan hidup dan pengembangan budaya baca masyarakat.

Untuk mendukung perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah, temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa kebijakan strategis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, diantaranya :

- 1) Melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan sekaligus membangkitkan motivasi mereka untuk mengapresiasi dunia pendidikan.
- 2) Meningkatkan pemberian beasiswa secara proporsional terutama bagi anak perempuan yang bersekolah di sekolah-sekolah maskulin.
- 3) Menghapus hambatan biaya (*cost barrier*) melalui pemberian bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi semua siswa disamping melakukan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.
- 4) Menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan minat perempuan sekolah menengah untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
- 5) Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal.
- 6) Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk di pedesaan yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan lain-lain program pendidikan berkelanjutan.

- 7) Membangun sarana-sarana yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan.
- 8) Bekerjasama dengan berbagai dinas yang terkait untuk memudahkan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan seperti memperbaiki jalan, penyediaan transportasi, dan lain-lain.
- 9) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah terutama penyediaan sarana dan sumberdaya manusia yang mumpuni bagi keberlanjutan pendidikan pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar.
- 10) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran terutama pada sekolah-sekolah yang jauh dari kota.

2. Relevansi Strategi Perluasan Akses yang Dilakukan Tripartit dengan Kebijakan Terhadap Perluasan Akses Perempuan Terhadap Pendidikan Menengah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di lokasi penelitian, baik pada sekolah-sekolah di kota maupun di pedesaan telah terdapat upaya dari masyarakat, sekolah, maupun pemerintah daerah dalam perluasan akses perempuan bersekolah. Walaupun strategi/upaya yang dilakukan bervariasi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas namun semuanya meriferen kepada kebijakan pemerintahan dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan secara umum maupun khusus terhadap perempuan. *Pertama*, berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah di lokasi penelitian melalui kebijakannya telah mengalokasikan dana bagi penyediaan sarana dan prasarana seperti memperbaiki gedung sekolah, perpustakaan, labor atau perbaikan fisik lainnya. Di pedesaan malah membangun kerjasama dengan berbagai instansi yang ada untuk membangun jalan atau

mempermudah transportasi siswa di daerah-daerah pedesaan. Hal ini sejalan dengan pengungkapan seorang kepala sekolah yang ada di pedesaan berikut ini :

“Jalan yang menghubungkan akses masyarakat ke sekolah selalu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Masyarakat malah berswadaya memperbaiki jalan-jalan yang rusak, agar siswa yang bersepeda motor tidak banyak mengalami kecelakaan. Demikian juga sarana dan prasarana yang ada tetap dipelihara walaupun belum optimal.”

Hal *kedua* yang cukup relevan adalah kebijakan perluasan akses ke perguruan tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan atau wawasan kepada siswa sekolah menengah agar tepat dalam memilih perguruan tinggi yang diminati. Disamping itu para alumni secara informal juga memberikan sosialisasi tentang bagaimana melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Kemudian yang *ketiga*, kebijakan perluasan akses bagi perempuan buta aksara usia 15 tahun ke atas mengikuti berbagai kursus-kursus guna meningkatkan kualitas hidup. Kebijakan ini dirasakan penting mengingat kebanyakan mereka sudah berkeluarga, dan tidak mempunyai waktu untuk mengenyam pendidikan.

Keempat, kebijakan bagi penyediaan sistem dukungan sosial bagi peningkatan kesempatan anak perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh masyarakat umumnya disalurkan dalam bentuk peran serta mereka pada komite sekolah. Sedangkan dalam sarana fisik baru taraf partisipasi belum dalam bentuk swadaya masyarakat, misalnya untuk membangun sarana yang diperlukan untuk pendidikan pada umumnya ataupun terhadap perempuan di sekolah menengah.

Kelima, kebijakan sekolah yang ada hendaknya dipastikan netral gender. Temuan penelitian menunjukkan semua sekolah tidak membedakan perlakuan antara

siswa perempuan dan siswa laki-laki, baik itu dalam pemberian bantuan beasiswa ataupun dalam menyediakan fasilitas khusus bagi keamanan dan kenyamanan siswa perempuan.

Keenam, kebijakan perluasan akses pendidikan melalui pemanfaatan secara optimal sarana teknologi informasi dan komunikasi sbagai sarana pembelajaran. Dewasa ini pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya internet membuat akses perempuan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih mudah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap teknologi tidak serta merta membuat perempuan dapat memberdayakan diri karena semuanya tergantung individu masing-masing dan ketersediaan teknologi yang bersangkutan.

C. Pembahasan.

Membicarakan strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat pada hakekatnya membicarakan inisiasi kebijakan publik tentang perluasan akses perempuan untuk sekolah menengah. Inisiasi kebijakan publik di bidang pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan setelah melihat output dari kebijakan tersebut dalam praktek (Tilaar dan Riant Nugroho, 2012). Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat kebijakan khusus di sekolah bagi perempuan untuk meningkatkan aksesnya terhadap pendidikan menengah. Kebijakan sekolah cenderung netral gender sehingga berdampak pada perolehan manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, laki-laki biasanya mendapatkan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kebijakan sekolah yang netral gender memang tidak ada masalah selagi kedua beban gender (laki-laki dan perempuan) merasakan dan mendapat manfaat

yang sama. Namun dalam kenyataannya sering perempuan memperoleh manfaat yang tidak sama. Dengan kondisi ini sekolah perlu merumuskan alternatif kebijakan tentang tindakan afirmasi dalam berbagai program sekolah agar kesetaraan dan akses perempuan untuk lebih maju dalam bidang pendidikan tercapai.

Berbagai upaya dari tripartit juga telah dilakukan. Disadari atau tidak, sekolah merupakan tanggungjawab bersama ketiga pihak tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tripartit tersebut memiliki strategi masing-masing dalam memberdayakan perempuan di bidang pendidikan. Khusus untuk perluasan akses perempuan telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Upaya yang telah dilakukan oleh keluarga/masyarakat yaitu :

- a. Menanamkan kesadaran pada orang tua/masyarakat akan arti penting pendidikan. Sosialisasi yang diberikan selama ini ternyata belum optimal. Perlu dilakukan upaya untuk merubah *mindset* (reorientasi pemikiran) bahwa sekolah merupakan tanggung jawab bersama.
- b. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam komite sekolah.
- c. Memberikan dukungan sepenuhnya dan memberikan jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan yang berkualitas.
- d. Penyediaan sistem dukungan sosial bagi peningkatan kesempatan anak perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan.

2. Upaya yang dilakukan oleh sekolah adalah :

- a. Sosialisasi kepada siswa di awal masuk sekolah diarahkan pada penyampaian program-program sekolah dan memberikan penyuluhan agar mereka yang masuk sesuai dengan minat awalnya. Namun materi sosialisasi belum mengarah kepada peningkatan akses perempuan bersekolah.

- b. Menanamkan *gender awareness* kepada seluruh warga sekolah sehingga iklim sekolah dapat lebih responsif gender.
 - c. Melakukan sistem penjangkaran penerimaan siswa baru secara *on-line* dan dirasakan berkeadilan. Namun hal ini perlu menjadi perhatian mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan. Dengan kata lain perlu tindakan/kebijakan afirmasi guna mendorong perempuan untuk memperluas akses pendidikan ke jenjang yang lebih luas lagi.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah yaitu :
- a. Melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama memberikan kesempatan yang lebih luas pada perempuan untuk bersekolah.
 - b. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lainnya dalam rangka meningkatkan minat perempuan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.
 - c. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat terutama memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan bekerjasama dengan berbagai dinas yang terkait untuk mempermudah akses penduduk dalam memperoleh pendidikan.

Dari berbagai strategi yang telah diupayakan oleh tripartit tersebut belum nampak sinergisitas antara ketiganya dalam mendesain kebijakan sehingga secara kongkrit dapat meningkatkan akses perempuan untuk bersekolah ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan publik yang diinisiasi hendaknya merupakan hasil kerjasama antara masyarakat, sekolah, dan pemerintahan daerah.

Bila dicermati lebih lanjut kebijakan publik dimaknai secara beragam karena dinyatakan oleh banyak ahli dengan perspektif yang berbeda. Thomas R. Dye (1975) menyatakan, “*public policy is whatever governments choose to do or not to do.*” Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dari definisi tersebut dinyatakan bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh pemerintah dan menyangkut pilihan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Seiring dengan upaya untuk memperbaiki situasi dan kondisi perempuan di berbagai bidang kehidupan termasuk juga bidang pendidikan terdapat beberapa kebijakan atau strategi program pemberdayaan perempuan. *Pertama*, kebijakan dalam program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan (*Women in Development/WID*) yang mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan. *Kedua*, kebijakan perempuan dan pembangunan (*Women and Development/WAD*) yang memberi makna bahwa kualitas kesertaan lebih penting daripada sekadar kuantitas. *Ketiga*, kebijakan dengan pendekatan *Gender and Development (GAD)* yang menekankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki atau sebaliknya. Dengan kata lain GAD memfokuskan kebijakan gerakannya pada hubungan gender dan kehidupan sosial. *Keempat*, kebijakan dengan pendekatan *Gender Mainstreaming (GEM)*. GEM merupakan pematangan dari strategi GAD yang tujuan dasarnya adalah menjadikan gender sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan. Sasarannya adalah kebijakan (negara), aksi (masyarakat), serta kerjasama institusi (negara dan masyarakat). Dengan kata lain melalui penerapan strategi ini diupayakan agar setiap kebijakan yang dibuat oleh institusi negara atau

setiap aksi yang dilakukan masyarakat dan yang lainnya menjadi sensitif gender atau menjadikan gender sebagai arus utamanya (Muhadjir M. Darwin dan Tukiran, 2001).

GEM diaras kebijakan pendidikan perlu mendapat perhatian bersama dari pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan umumnya pihak sekolah dan pemerintah daerah mengklaim bahwa kebijakannya netral gender dalam artian kebijakan yang tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam mendapat akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan. Bila akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan antara laki-laki dan perempuan sama, tidak perlu ada perubahan kebijakan dari netral gender menjadi responsif gender. Tetapi bila akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak sama, maka ada dua alternatif pilihan kebijakan, yaitu : *Pertama*, jika perempuan senantiasa tertinggal dibandingkan dengan laki-laki perlu kebijakan responsif gender dalam bentuk *affirmative action*. *Kedua*, jika perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki atau sebaliknya, maka perlu kebijakan responsif gender dalam bentuk pengarusutamaan gender (Ismi Dwi Astuti, 2009). Berdasarkan hal ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada netral gender, baik dari sekolah ataupun pemerintah daerah. Namun perolehan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaannya berbeda. Laki-laki biasanya memperoleh manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Ada beberapa strategi untuk menjalankan kebijakan agar tidak bias gender. Nugroho (2003) menganjurkan empat strategi pokok sebelum menjalankan kebijakan agar tidak bias gender. *Pertama*, pastikan para pelaksana memahami bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro gender. *Kedua*, memastikan bahwa ada mekanisme *reward and punishment* bagi pematuh dan pelanggarnya. *Ketiga*,

mempunyai ukuran kinerja yang pro gender. *Keempat*, mengevaluasi kinerjanya, dan persyaratan pokok yang harus dipenuhi antara lain : (1) adanya kesamaan konsepsi tentang gender dan kesetaraan gender ; (2) adanya kecukupmampuan untuk melakukan evaluasi dalam konteks kesetaraan gender ; (3) alat ukur evaluasi itu sendiri harus mampu mencerminkan pelaporan tentang sejauh mana kesetaraan gender dicapai oleh sebuah kebijakan publik tertentu tidak terkecuali kebijakan di bidang pendidikan dalam hal ini perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah.

Inisiasi kebijakan yang harus dilakukan oleh tripartit agar dapat diformulasikan di tingkat pemerintah daerah dan diimplementasikan di tingkat sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan strategi sosialisasi terpadu antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pentingnya arti perluasan akses perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kebijakan ataupun strategi sosialisasi terpadu hendaknya direncanakan secara serentak di seluruh kecamatan dengan meletakkan tanggung jawab pelaksanaan pada Unit Pelaksana Teknis. Adanya sosialisasi terpadu, serentak dan komprehensif akan meminimalisasi pengaruh faktor budaya yang tidak selalu mementingkan perempuan sekolah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Perlu ditetapkan alternatif kebijakan pendidikan yang berperspektif gender secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai inisiator kebijakan seperti : prioritas mendapatkan beasiswa bagi perempuan untuk jurusan-jurusan yang

dianggap maskulin, penyediaan sarana dan prasarana yang mempertimbangkan kepentingan perempuan, *punishment* yang mempertimbangkan aspek gender sampai kepada proses pembelajaran di kelas-kelas dan lingkungan sekolah yang responsif gender.

3. Perlu ditetapkan kebijakan khusus yang disetujui untuk perluasan akses perempuan terhadap pendidikan dengan melakukan tindakan afirmasi. Dalam hal ini sekolah hendaknya memiliki data dan informasi terpilah antara perempuan dan laki-laki yang dapat digunakan untuk analisis pendidikan yang berpihak kepada perempuan dan laki-laki secara seimbang. Disamping itu sekolah juga perlu merumuskan tindakan afirmasi dalam berbagai program sekolah agar kesetaraan dalam pendidikan tercapai misalnya memberikan afirmasi terhadap sistem penjurangan (penyeleksian dan penerimaan input).
4. Perlu diinisiasi kebijakan bagi penyediaan sistem dukungan sosial untuk peningkatan kesempatan anak perempuan dalam mengikuti pendidikan lanjutan. Pihak pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat hendaknya secara periodic mengevaluasi dan sekaligus menetapkan kebijakan untuk mendukung perempuan melanjutkan sekolah di usia sekolah ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga membuat kebijakan perluasan akses perempuan buta aksara usia produktif melalui jalur pendidikan non-formal.
5. Perlu diinisiasi kebijakan peningkatan pengetahuan perempuan mengenai penerapan teknologi tepatnya yang berperspektif gender termasuk kebijakan perluasan akses pendidikan melalui pemanfaatan secara optimal sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran.

Inisiasi-inisiasi kebijakan sebagaimana diungkapkan sebelumnya harus dilakukan secara bersama oleh tripartit. Hal ini pada hakekatnya merupakan intervensi atau *leverage* (pengungkit) sehingga dapat memfasilitasi perluasan akses perempuan terhadap sekolah menengah. Oleh sebab itu menurut Azhar Kasim (2012) peran pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu memfasilitasi siklus proses *thinking a head, thinking again, and thinking across* dalam administrasi pemerintah daerah.

Proses *thinking a head* proses pemecahan masalah secara visioner, strategik, dan mengoperasionalkan menjadi program dan kegiatan nyata. Jangan hanya menangani akibat, tetapi harus sampai ke akar permasalahan. Proses *thinking again* mencakup proses evaluasi terhadap program kegiatan sehingga diketahui hasil maupun hambatannya. Proses *thinking across* adalah proses perbandingan termasuk *benchmarking* dengan daerah lain atau negara lain. Sedangkan hasil *thinking across* dijadikan umpan balik pada proses *thinking a head*, selanjutnya. Jadi merupakan bagian dari siklus proses perubahan. Oleh karena itu pemerintah dituntut agar melakukan pilihan-pilihan strategis yang tepat dan memformulasikannya dalam paket perluasan akses perempuan dalam pendidikan. Kebijakan strategis yang perlu segera dibenahi adalah menciptakan sekolah yang responsif gender.

Adapun indikator sekolah yang responsif gender dapat dilihat melalui tiga hal yaitu dari aspek manajemen, aspek pembelajaran, dan aspek peran serta masyarakat.

Menurut Keppi Sukei dari Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan LPPM Universitas Brawijaya dalam makalahnya Peningkatan Kapasitas Gender dalam Pendidikan menyebutkan bahwa dari aspek manajemen, indikator sekolah responsif gender adalah : (1) laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang setara dalam mengendalikan sistem pendidikan di sekolah ; (2) laki-laki dan

perempuan memiliki kesempatan dan peran yang setara dalam membina, mengarahkan, dan melaksanakan pelayanan pendidikan di sekolah dan dapat memperoleh manfaat yang sama dari kesempatan dan peran tersebut ; (3) sekolah menghargai adanya karakter kerja, kesempatan, dan tugas khusus yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan pribadi ataupun dalam menjalankan tugas kedinasan ; dan (4) data dan informasi yang digunakan guru dan kepala sekolah terpilah antara laki-laki dan perempuan serta digunakan untuk analisis pendidikan yang berpihak pada laki-laki dan perempuan secara seimbang.

Selanjutnya dalam aspek pembelajaran, indikator sekolah yang responsif gender sangat tergantung kepada kurikulum, lingkungan/asmosfir, dan sarana-prasarana penunjang. Kemudian dari aspek peran serta masyarakat, maka indikator sekolah yang responsif gender diketahui melalui dukungan individu, dukungan kelembagaan, institusi sosial, budaya penunjang dan peran *stakeholders*.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan terkait dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan sekolah cenderung netral gender dan tidak ada kebijakan afirmasi yang diberlakukan bagi perluasan akses perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Kebijakan sekolah yang cenderung netral gender berdampak pada`perolehan manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (laki-laki biasanya mendapatkan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan).
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga/masyarakat, sekolah, ataupun pemerintah untuk perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah masih dilakukan secara parsial. Untuk itu perlu sinergisitas dalam menyusun kebijakan strategis yang melibatkan tripartit, dimana pemerintah daerah berperan sebagai inisiator kebijakan.
3. Kebijakan strategis yang diperlukan demi peningkatan akses perempuan dalam pendidikan umumnya dilakukan oleh tripartit dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi terpadu antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pentingnya arti perluasan akses perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
 - b. Menetapkan alternatif kebijakan pendidikan yang berperspektif gender secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai insiator kebijakan.

- c. Menetapkan kebijakan khusus yang disetujui untuk perluasan akses perempuan terhadap pendidikan dengan melakukan tindakan afirmasi.
- d. Menginisiasi kebijakan bagi penyediaan sistem dukungan sosial untuk peningkatan kesempatan anak perempuan dalam mengikuti pendidikan lanjutan.
- e. Menginisiasi kebijakan peningkatan pengetahuan perempuan mengenai penerapan teknologi, tepatnya yang berperspektif gender termasuk kebijakan perluasan akses pendidikan melalui pemanfaatan secara optimal sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran.

B. Saran.

Terkait dengan temuan penelitian ini, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian tripartit pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Memformulasikan kebijakan afirmasi bagi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah, sehingga memungkinkan perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan dan kemanfaatan yang sama di bidang pendidikan. Dalam hal ini pemerintah daerah berlaku sebagai inisiator kebijakan.
2. Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis hendaknya melakukan sosialisasi secara serentak dengan melibatkan sekolah dan masyarakat bagi upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan serta membangun kesadaran atau sensitifitas gender.
3. Sekolah-sekolah yang maskulin hendaknya dalam aspek manajemen, pembelajaran, aspek pembelajaran, serta aspek dukungan masyarakat hendaknya responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis. (2002). "Kebijakan Publik dalam Pendidikan : Sebuah Kritik dengan Perspektif Gender" dalam *Jurnal Perempuan* 23. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Azhar Kasim. (2012). *Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Universitas Negeri Padang tanggal 14 Oktober 2012.
- Bogdan, RC. & Biklen, SK. (1998). *Qualitative Research in Education : An Introduction to Theory and Methods*. Boston : Allyn and Bacon.
- Depdiknas. (2003). *Materi Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Materi Workshop Capacity Building Stakeholder Pendidikan di Kusuma Sahid, 20-22 Oktober 2003.
- Dye, Thomas R. (1975). *Understanding Public Policy*. New York : NJ. Prentice Hall.
- Fadhil, Jabir Khaidir. (2002). *Isu-isu Gender dalam Pembangunan*. Makalah disampaikan dalam Forum Pelatihan Metodologi Berperspektif Gender, yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang, 19-20 Juni 2002.
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- HAR. Tilaar dan Riant Nugroho. (2012). *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ihromi, Tapi Omas. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung : Alumni.
- Ismi Dwi Astuti. (2009). *Kebijakan Publik Pro Gender*. Solo : UNS Press.
- Lerman, Hannah & Natalie Porter. (1990). *Feminist Ethic in Psichoteraphy*. New York : Springer Publishing Co. Inc.
- MacDonald, Mandy (ed.). (1993). *Gender Planning in Development Agencies Meeting the Challenge*. London : Oxfom Publication.
- Miles, Mattew B. & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moore, A. Hellen & Jane C. Ollenburger. (1996). *Sosiologi Wanita*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Muhadjir M. Darwin dan Tukiran. (2001). *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- O'Neil, William. (2001). *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukei, Keppi. (2002). *Teknik Analisis Gender dalam Kebijakan Pendidikan : Gender Analysis Pathway (GAP)*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Metodologi Penelitian Gender yang diselenggarakan oleh DIRBINLITABMAS-Dikti, Batu-Malang, 16-20 Juni 2002.
- Supriandi, Yusuf, dkk. (2001). *Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia*.
- Tan, Mely G. (1997). "Perempuan dan Pemberdayaan " dalam Smita Notosusanto, dkk. (Penyunting). (1997). *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta : Kerjasama Pascasarjana UI dengan Harian Kompas dan Penerbit Obor.
- Tilaar, H. A. R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Indonesia*. Bandung : PT. Rosdakarya.
- Vredenberg, J. (1979). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Worrell, Judith & Pam Remer. (1992). *Feminist Perspectives in Therapy : An Empowerment Models for Women*. New York : John Wiley and Sons.

Instrumen Penelitian

A. Pedoman Wawancara untuk Informan Kalangan Masyarakat.

1. Bagaimana bentuk dukungan yang Bapak/Ibu berikan terhadap strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam bersekolah?
2. Bila ada dukungan, faktor-faktor apakah yang Bapak/Ibu rasakan sangat berpengaruh terhadap perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah?
3. Sebagai masyarakat, bagaimanakah kontrol yang Bapak/Ibu lakukan terhadap peningkatan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah?
4. Program-program apakah menurut Bapak/Ibu yang lebih mendesak dilakukan untuk peningkatan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah?
5. Mengapa program-program tersebut dirasakan penting untuk dilaksanakan?
6. Apakah Bapak/Ibu sepakat bahwa pendidikan bagi perempuan itu penting?

B. Pedoman Wawancara untuk Sekolah.

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat?
2. Apakah upaya-upaya pemerintah dalam melakukan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah implementasi kebijakan-kebijakan tersebut di tingkat sekolah?
4. Kongkritnya upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh sekolah terkait dengan sosialisasi perluasan perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat?
5. Bagaimanakah kebijakan-kebijakan sekolah yang menyangkut persoalan perluasan akses (seperti sistem penjangkauan, penyeleksian, dan penerimaan input, serta kebijakan-kebijakan lainnya)?

C. Pedoman Wawancara untuk Pemerintah.

1. Bagaimanakah kondisi angka partisipasi sekolah dari jenjang SMA di Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah upaya-upaya pemerintah dalam melakukan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat?
3. Kebijakan-kebijakan apa yang berhasil dan mana yang gagal?
4. Bila dilihat dari segi tripartit, kebijakan-kebijakan apa yang dibuat selama ini menyangkut strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat? Apakah kebijakan tersebut melingkupi ketiga unsur tripartit?
5. Kebijakan apa yang paling dominan berpengaruh terhadap perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat? Bagaimanakah dampaknya secara kuantitatif dan kualitatif?

CURRICULUM VITAE KETUA PENELITI

A. Identitas Diri.

1	Nama Lengkap	Drs. Suryanef, M.Si.
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala.
3	NIP	19640606 1991 03 1 006.
4	NIDN	0006066407.
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Payakumbuh, 06 Juni 1964.
6	Alamat Rumah	Perumahan Pondok Pinang C-16 Lubuk Buaya, Padang 25173
7	Nomor Telepon/Faks/HP	0751-482731/ 08126769926.
8	Alamat Kantor	Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Jl.Prof.Dr.Hamka Air Tawar Padang
9	Nomor telepon/Faks	0751-7055671/0751-7055671
10	Alamat e-mail	farhansuryanef@yahoo.co.id
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1 = 125 orang
12	Mata Kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilmu Politik. 2. Sistem Politik Indonesia. 3. Demokrasi di Indonesia. 4. Metode Penelitian Sosial.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama PT	IKIP Padang	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.	-
Bidang Ilmu	Pendidikan Kewarganegaraan.	Ilmu Politik.	-
Tahun Masuk	1984	1997	-
Tahun Lulus	1990	1999	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Hubungan Status Sosial dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kenagarian Simalanggang, Kabupaten 50 Kota.	Faktor-faktor yang Menentukan Perilaku Memilih Generasi Muda dalam Pemilihan Umum 1997 di Kotamadya Padang.	-
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Syafnil Effendi, SH. Drs. Mazzia Luth, MS.	Dr. Riswandha Imawan.	-

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp.)
1.	2011	Pemetaan Orientasi Politik dan Perilaku Pemberian Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Padang. (AnggotaPeneliti).	DIPA Universitas Negeri Padang	7,5
2.	2010	Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagai Basis Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. (Tahun III), (Ketua Peneliti).	Hibah Bersaing	50,25
3.	2009	Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagai Basis Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. (Tahun II), (Ketua Peneliti).	Hibah Bersaing	50
4.	2009	Desentralisasi Politik : Kajian Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Sumatera Barat. (Anggota Peneliti).	Strategis Nasional	99
5.	2009	Evaluasi Nagari Binaan Pilot Proyek Dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat. (Anggota Peneliti).	BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.	67,5
6.	2008	Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagai Basis Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. (Tahun I), (Anggota Peneliti).	Hibah Bersaing	48,5
7.	2008	Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Barat. (Anggota Peneliti).	Balitbangda Provinsi Sumatera Barat.	37,5
8.	2007	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan di Nagari-nagari Sumatera Barat. (Ketua Peneliti).	Balitbang Depdiknas, Jakarta.	25
9.	2007.	Perilaku Pemberian Suara, Akses dan Kontrol Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang. (Anggota Peneliti).	DIPA Universitas Negeri Padang.	7,5

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp.)
1.	2011	Pemberdayaan Masyarakat Adat Nagari Menuju Akselerasi Pembangunan Nagari . (Anggota Pelaksana).	IPTEKS Lokal (DIPA Universitas Negeri Padang).	7,5

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp.)
2.	2009	Peningkatan Pengetahuan, Kepedulian serta Keterampilan Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) di Kota Padang dalam Melakukan Aktifitas Politik. (Ketua Pelaksana).	IPTEKS Nasional	10
3.	2009	Peningkatan Pengetahuan dan Profesionalisme Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Nagari dan Masyarakat Adat di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. (Anggota Pelaksana).	IPTEKS Lokal (DIPA Universitas Negeri Padang).	5
4.	2008	Pendalaman Materi Pembelajaran PKn Bagi Guru-guru PKn SMP Negeri se-Kabupaten Tanah Datar Tentang Hak Asasi Manusia. (Ketua Pelaksana).	MGMP Kabupaten Tanah Datar.	3
5.	2008	Pendalaman Materi Pembelajaran PKn Bagi Guru-guru PKn SMA Negeri se-Kota Padang Tentang Dinamika Sistem Politik Indonesia. (Ketua Pelaksana).	MGMP Kota Padang.	3
6.	2007	Pendalaman Materi Pembelajaran PKn Bagi Guru-guru PKn SMK Negeri se-Kota Padang Tentang Hak Asasi Manusia dan Sistem Politik (Ketua Pelaksana).	MGMP Kota Padang.	3
7.	2007	Pendalaman Materi Pembelajaran PKn Bagi Guru-guru PKn SMP Negeri se-Kabupaten Tanah Datar Tentang Budaya Politik. (Ketua Pelaksana).	MGMP Kabupaten Tanah Datar.	3

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1.	2011.	Pelaksanaan Pilkada Langsung di Sumatera Barat Ditinjau Dari Perspektif Desentralisasi Politik (Penulis Utama).	Tahun 2011, Nomor 1.	Jurnal Analisa Politik.
2.	2011	Pelaksanaan Evaluasi Nagari Binaan Pilot Proyek di Nagari-nagari Sumatera Barat. (Mandiri).	Vol.X, No.1, April 2011.	Jurnal Demokrasi.
3.	2008	Marjinalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. (Penulis Utama).	Vol.VII, No.1, April 2008.	Jurnal Demokrasi.
4.	2007	Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. (Mandiri).	Edisi 02 Tahun 2007.	Jurnal Balitbang Provinsi Sumatera Barat.

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Nasional “Strategi dan Asesment dalam Meningkatkan Soft Skill Peserta Didik dalam Pembelajaran PKn”.	Assesment Pembelajaran PKn dalam Upaya Meningkatkan Soft Skill Peserta Didik.	28 Januari 2012. STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh.
2.	Seminar Nasional “Wawasan Kebangsaan dan Kesatuan di Era Globalisasi”, diselenggarakan LPKP Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri RI.	Peran <i>Civil Society</i> dalam Menumbuhkembangkan Nasionalisme.	29 November 2011, Pangeran Beach Hotel.
3.	Seminar Nasional “Pembelajaran Aktif untuk Perguruan Tinggi”.	Pembelajaran Model Jigsaw dalam Perkuliahan Pendidikan Politik.	5-6 Juli 2010, Hotel Mulia, Jakarta.
4.	Seminar “Pemilu dan Hak Asasi Manusia” diselenggarakan Kanwil Depkum dan HAM Provinsi Sumbar.	Pemilu sebagai Pengimplementasian Hak-hak Politik.	6 April 2009, Pangeran City Hotel.
5.	Seminar Nasional Hasil Penelitian Hibah Bersaing.	Pemberdayaan Masyarakat Adat di Nagari-nagari Sumatera Barat.	7-8 April, 2008, Hotel Millenium, Jakarta.
6.	Seminar Nasional “Menuju Pemilu Demokratis”.	Kampanye dalam Pemilu yang Demokratis.	Fakultas Hukum Universitas Andalas, 4 Februari 2007.

G. Pengalaman Penulisan Buku

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI

No	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	NomorP/ID


H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya

No.	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat

**I. Penghargaan Yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir
(Dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi Lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Dosen Berprestasi I.	Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.	2007.
2.	Tim Terbaik Pengimplementasian Pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggi.	Decentralized Basic Education (DBE)-USAID, Jakarta.	2010
3.	Poster Terbaik Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2012.	DP2M Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	2012
4.	Peneliti Berprestasi I Universitas Negeri Padang Tahun 2012.	Universitas Negeri Padang.	2012

Padang, Desember 2012
Yang bersangkutan,


Drs. Suryanef, M.Si.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap	Dra. Maria Montessori M.Ed., M.Si	
2. NIP	19600202 198403 2001	
3. Jabatan	Lektor Kepala	
4. Pangkat dan golongan	Pembina Tingkat 1 / IV. b	
5. Tanggal lahir	2 Februari 1960	
6. Tempat lahir	Tanah Datar	
7. Jenis Kelamin	Perempuan	
8. Agama	Islam	
9. Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Padang	
10. Fakultas / Jurusan	FIS / Ilmu Sosial Politik	
11. Jabatan Struktural	-	
12. Alamat Perguruan Tinggi	Air Tawar- Padang	
13. Telp / Fax	0751- 445187	
14. Status Perkawinan	Kawin	
15. Alamat	a. Jalan	Jl. Teknologi IX, No. 3 Siteba, Padang
	b. Kelurahan/Desa	Surau Gadang
	c. Kecamatan	Nanggalo
	d. Kota	Padang
	e. Propinsi	Sumatera Barat
16. Telp.	a. Rumah	(0751) 7056476
	b. HP	08126622466
	c. e-mail	maria.montessori @ rocketmail. com

II. PENDIDIKAN

Pendidikan di dalam dan di luar Negeri

No.	Tingkat	Pendidikan	Jurusan	Tahun	Tempat
1	2	3	4	5	6
1.	SD	SDN 1	-	1972	Tabek Patah
2.	SLTP	SMPN 1		1975	Lubuk Sikaping
3.	SLTA	SPGN 1	SD	1979	Padang
4.	Perguruan Tinggi				
	S1	IKIP	PMP/KN	1983	Padang
	S2	La Trobe Univ	Social Studies	1998	Australia
	S2	UNPAD	Sosiologi	2001	Bandung

III. RIWAYAT PEKERJAN

1. Riwayat kepangkatan golongan ruang pengajian

No.	Pangkat dan Jabatan	Gol. Ruang Pengajian	Berlaku terhitung mulai	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Penata Muda	III. a	1 Maret 1984	
2.	Penata Muda Tk. I	III. b	1 Oktober 1987	
3.	Penata / Lektor Muda	III. c	1 Oktober 1990	
4.	Pembina Tk. I / Lektor	III. d	1 Oktober 1993	
5.	Pembina/Lektor Kepala	IV. a	1 April 2004	
6	Pembina Tk1/Lektor kepala	IV. b	1 Oktober 2007	

Mata Kuliah yang diasuh (3 tahun terakhir)

1. Evaluasi Pembelajaran
2. Kurikulum dan Bahan Ajar
3. Strategi Pembelajaran
4. Perkembangan peserta Didik
5. Sosiologi Politik
6. Sistem Sosial Indonesia
7. Perspektif Global
8. Pemberdayaan masyarakat
9. Filsafat Pancasila

Pengalaman Administrasi / Kelembagaan (3 tahun terakhir)

1. Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik periode 2003-2007
2. Anggota Senat Universitas UNP Periode 2004 -2008
3. Anggota Tim Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2007 - 2009.
4. Tim Aessor Serifikasi Guru Universitas Negeri Padang tahun 2007 Sampai Sekarang
5. Anggota Tim Penilai Guru berprestasi Tingkat Sumatera Barat Tahun 2008
6. Ketua Tim Pakar Program Pembudayaan Nilai Pancasila Dinas Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2007

Karya Ilmiah :

Penelitian / Artikel

1. The Implementation of Cooperative Learning Approaches in Teaching Studies of Society and Environment in a Victorian Primary School, Australia.
2. Penundaan Usia Perkawinan dan Konsekuensinya pada Sistem Sosial Masyarakat di Kecamatan Salimpaung Sumatera Barat.
3. Implementation of Active Learning in Indiana Secondary School, USA.
4. Pola Pikir Guru SMA tentang Perannya dalam Mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan.
5. Pertanyaan Guru (Teachers Questioning) sebagai Sebuah Pendekatan dalam Pembelajaran Kewarganegaraan.
6. Pendidikan Kewarganegaraan dan Keterampilan Berpikir.

7. Membangun Budaya Demokratis dengan Strategi Cooperative Learning
8. Life Skills dalam Pembelajaran SOSE di Australia.
9. Pendidikan Kewarganegaraan dan Reformasi Politik di Indonesia.
10. Upaya Membangun Budaya Demokratis Dalam Pembelajaran Sosilogi Politik Menggunakan Metode Cooperative Learning Jigsaw II Pada Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan FIS-UNP
11. Analisa penilaian hasil belajar mahasiswa oleh Dosen FIS UNP.
12. Pengembangan Model Pembelajaran Antikorupsi di Sekolah Menengah Atas Kota Padang

Padang September 2011



Dra. Maria Montessori, M.Ed., MSi
NIP. 19600202 198403 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jln. Kuini No. 79.A Telp. 0751 – 31554 Padang

REKOMENDASI

No.B.070/778/WAS-BKPL/2012

TENTANG

IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Kami Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas, setelah mempelajari Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang Nomor : 204/UN35.2/PG/2012 tanggal 3 Mei 2012, Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : **Drs. SURYANEF, M.Si.**
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh /6 Juni 1964.
Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Padang.
Alamat : Perum Pandok Pinang Blok C 16 Lubuk Buaya.
No.Kartu Identitas : 1371110606640008.
Judul : **Strategi Perluasan Akses Perempuan Terhadap Pendidikan Menengah di Sumatera Barat.**
Lokasi penelitian : Dinas Pendidikan 1. Kabupaten Lima Puluh Kota, 2. Kota Padang.
Waktu penelitian : Mei – Oktober 2012.
Anggota : - Dra. Maria. Montessori, M.Ed, M.S.i

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Padang, 22 Mei 2012.
An. KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
PROV. SUMATERA BARAT
BABANKEWASPADAAN
KEKBANGPOLINMAS
MAZAL, S.H.
Pembina
NIP. 19570502 198503 1 004.

Tembusan Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta.
2. Bapak. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Walikota Padang Cq. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Padang.
4. Sdr. Bupati Lima Puluh Kota Cq. Kepala Kesbangpol di Payakumbuh.
5. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telp. (0751) 21554-21825 Fax.(0751) 21554 Website: <http://www.diknas-padang.org>

IZIN PENELITIAN NOMOR : 900/316/DP/KPMP.2/2012

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang berdasarkan Surat Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prov.Sumatera Barat Kabid Kewaspadaan Nomor: 661/Pend/03/vii-2012 tanggal 06 Agustus 2012 perihal izin melaksanakan penelitian, pada prinsipnya dapat memberikan Izin tersebut kepada :

Nama/NIM : Drs.SURYANEF,M.si
Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Padang
Anggota : Dra.Maria.Montessori,M.Ed,M.Si
Junaidi Indrawadi.S.Pd.M.Pd
Judul : "Strategi Perluasan Akses Perempuan Terhadap Pendidikan Menengah di Sumatera Barat"
Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Padang dan SMAN Se Kota Padang
Jadwal : Agustus s/d Desember 2012

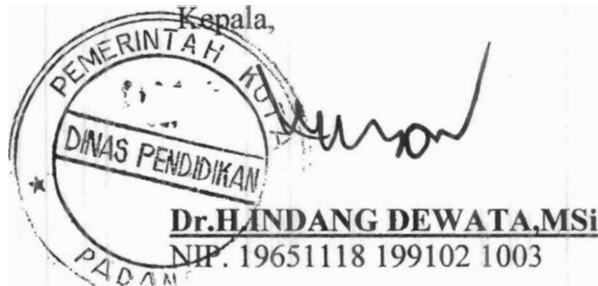
DenganKetentuan :

1. Selama kegiatan berlangsung tidak Mengganggu Proses BelajarMengajar
2. Setelah selesai melakukan pengumpulan data penelitian agar memberikan laporan 1 Rangkap ke Dinas Pendidikan Kota Padang Up. Bidang Program dan Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan
3. Kegiatan Tersebut dilaksanakan diluar jam belajar siswa.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Agustus 2012

Kepala,



Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
2. Bapak Walikota Padang (SebagaiLaporan)
3. Ketua Lembaga Peneliti Universitas Negeri Padang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang dan Se SMAN Kota Padang
5. Yang Bersangkutan

Strategi Perluasan Akses Perempuan Terhadap Pendidikan Menengah di Sumatera Barat

Oleh : Suryanef dan Maria Montessori.

A. Pendahuluan.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (*equity*) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas.

Untuk itu berbagai regulasi telah diciptakan, mulai dari pasal 31 UUD 1945 yang tidak membedakan hak untuk mengenyam pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan sampai kepada Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kesemua regulasi tersebut memberikan jaminan hukum bagi persamaan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Namun dalam realitasnya, statistik gender secara nasional maupun lokal menggambarkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya angka buta huruf, angka putus sekolah, dan menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dialami perempuan.

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan telah menjadi kebijakan utama di beberapa negara berkembang selama lebih dari tiga dekade terakhir ini, termasuk Negara Indonesia. Jika dirunut ke belakang, perbincangan tentang pendidikan perempuan telah dimulai sejak tahun 1970 sejalan dengan lahirnya kritik di kalangan feminis terhadap model pembangunan yang merugikan perempuan. Kritik yang dilancarkan kaum feminis dunia tersebut, pada akhirnya melahirkan rekomendasi akan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Lima tahun kemudian diselenggarakan Konferensi Dunia I tentang perempuan di Mexico City pada tahun 1975 yang secara tegas merekomendasikan kepada seluruh negara anggota agar diberi kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi perempuan (Ihromi, 2000). Konferensi Dunia IV tentang perempuan yang berlangsung di Beijing tahun 1995 pada akhirnya

menetapkan rencana program aksi di 12 bidang kritis, yang diantaranya adalah tentang perempuan dan pendidikan.

Di Indonesia secara normatif, negara telah mengambil peran penting untuk memajukan perempuan di segala bidang sebagaimana tertera dalam pasal 28c ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta budaya serta meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Landasan hukum lain yang memastikan terciptanya kesetaraan gender adalah UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan, program dan kelembagaan termasuk bidang pendidikan. Lebih khusus lagi UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah membuat beberapa paradigma baru yang lebih memberi kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

Rangkaian kebijakan pendidikan yang responsif tersebut ternyata tidak memberikan kesetaraan dan keadilan dalam tataran empiris. Menurut Arivia (2002) persoalannya adalah dalam pelaksanaannya ternyata pendidikan bukanlah sesuatu yang bebas nilai, karena ia merupakan produk konstruksi sosial. Terlebih-lebih ada jenis kelamin dalam masyarakat yaitu perempuan yang tidak selalu diuntungkan akibat konstruksi sosial tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan lembaga sosial yang amat penting dalam membentuk dan kemudian memposisikan individu laki-laki dan perempuan pada golongan dan strata tertentu dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cenderung menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk ketidakadilan.

Statistik gender secara nasional menggambarkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Supriandi, dkk. (2001) dalam buku Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia menyebutkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) terlihat dominan rendah dalam usia 12 -18 tahun, sedangkan persentase perempuan yang buta huruf dua kali lebih besar dari laki-laki (13,85% dan 6,26%). Sementara jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan

perempuan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan yang tidak menamatkan pendidikan dua kali lebih banyak bila dibandingkan dengan laki-laki yaitu 13,32% untuk perempuan dan 5,96% untuk laki-laki. Pendapat senada dikemukakan oleh Arivia (2002), rata-rata angka masuk sekolah perempuan adalah 49,18% sedangkan laki-laki 50,82% di tingkat sekolah dasar. Untuk tingkat SLTP angka masuk siswa perempuan turun menjadi 46,43% sedangkan laki-laki menjadi 53,56%. Sementara di tingkat SLTA angka masuk perempuan mencapai 41,45% sedangkan laki-laki 58,55%. Di perguruan tinggi, rata-rata angka masuk perempuan hanya 33,36%, sedangkan laki-laki 66,44%. Dengan demikian, angka-angka statistik partisipasi bersekolah masyarakat tersebut menunjukkan makin tinggi tingkat jenjang pendidikan maka makin rendah akses perempuan terhadap pendidikan.

Di Sumatera Barat berdasarkan profil statistik dan indikator gender Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, terlihat bahwa selama kurun waktu 1996 – 2000 juga memperkuat kenyataan bahwa rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan apabila dibandingkan dengan laki-laki. Indikator lain yang dapat menggambarkan perluasan akses dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan adalah gambaran siswa putus sekolah (angka putus sekolah).

Fenomena kesenjangan gender di bidang pendidikan sebagaimana terungkap sebelumnya, perlu segera mendapatkan upaya perbaikan yang komprehensif. Untuk itu penelitian ini penting dilakukan terlebih mengingat pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGs)* tahun 2015 diharapkan dapat mencapai tujuan. Satu diantara berbagai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diteliti strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah, maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu permasalahan penelitian ini memfokuskan diri pada “*Bagaimanakah strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah?*”

Sehubungan dengan fokus penelitian, maka penelaahan literatur dalam penelitian ini berhubungan dengan persoalan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan.

Pendidikan dalam suatu bangsa memegang peranan yang cukup penting. Perkembangan dan kemajuan sumberdaya pada suatu negara sangat bergantung pada hasil pendidikan yang memberikan kesempatan pada perkembangan manusia secara utuh (Tilaar, 1999). Dalam rangka membentuk manusia yang utuh, pendidikan di Indonesia hendaknya berupaya menjunjung tinggi adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama sebagai manusia dan mewujudkan kemampuannya untuk berperan aktif dalam pembangunan. Sementara itu keadilan gender merupakan proses yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Supaya proses untuk menjadi adil terwujud, diperlukan banyak langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara sosial dan menurut sejarah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkan. Keadilan gender dalam pendidikan secara tegas dicantumkan ke dalam Deklarasi Beijing tahun 1996 bahwa : "pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan, perkembangan dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (*equity*) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas." hal senada juga dapat ditemui dalam kebijakan pendidikan untuk semua (*educational for all*) yang telah disepakati di Dakar Singal. Beberapa isi dari kesepakatan tersebut berkaitan dengan pendidikan dan kesetaraan gender yakni : *Pertama*, menjamin bahwa menjelang 2015 semua anak khususnya perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik. *Kedua*, mencapai perbaikan 50% pada tingkat *literary* orang dewasa menjelang tahun 2015 terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. *Ketiga*, menghapus disparitis gender di bidang pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2015 dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan yang berkualitas (Depdiknas, 2003).

Penelitian Suryadi (dalam Sukei, 2002) menyebutkan ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain dari gejala berbedanya akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, rendahnya angka

partisipasi perempuan pada setiap studi, dan akses bagi partisipasi perempuan terhadap jurusan, ilmu dasar seperti fisika, kimia biologi dan teknologi industri masih rendah. Penelitian yang lebih intens tentang bias gender dalam pendidikan oleh Muthali'in (2001) yang secara umum menyimpulkan bias gender di sekolah tidak hanya ditemukan dalam proses pembelajaran (seperti buku pelajaran, media dan metoda, komponen-komponen proses belajar mengajar) tetapi juga tercermin dalam sistem sosial yang berlangsung di sekolah. Hal senada juga dikemukakan Fadhil (2002) yang menyebutkan bahwa dalam 210 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, 50,3% diantaranya perempuan dan dari jumlah tersebut, 65% berada pada usia produktif (15 – 60 tahun). Namun angka statistik secara umum menonjolkan bahwa kaum perempuan mendapat posisi yang kurang menguntungkan terutama dalam bidang pendidikan.

Bias gender dalam pendidikan ternyata merugikan satu peran gender yaitu perempuan. Padahal menurut Moore (1996) bila ditinjau dari teori fungsional peran sekolah dapat meningkatkan modal sosial laki-laki dan perempuan. Ternyata peningkatan modal sosial antara perempuan dan laki-laki tidak mengalami persamaan. Demikian juga dengan teori konflik. Berdasarkan teori ini direkomendasikan bahwa isi kurikulum mengandung bias kultural yang kadangkala mendistorsi perempuan dan dimensi-dimensi kehidupan yang penting buat perempuan. Di sisi lain dapat dijelaskan bahwa paling tidak ada tiga macam paradigma yang biasa mewarnai gerak langkah lembaga pendidikan. *Pertama*, paradigma konservatif yang menyebutkan ketidaksetaraan merupakan hukum alam dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari. Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius. Menurut paradigma ini menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari kesalahan mereka sendiri karena kelalaian mereka untuk belajar dan bekerja keras. *Kedua*, paradigma liberal yang menganggap bahwa persoalan ekonomi politik tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, pengadaan laboratorium atau komputer dan sebagainya, yang secara umum terisolasi dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya, dan represi politik yang ada dalam masyarakat. Pendidikan justru berfungsi untuk menstabilkan

norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan, dan memproduksi nilai-nilai tata susila agar berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada umumnya membangun kesadaran dimana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau *given*, dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan (Fakih dalam O'Neil, 2001). *Ketiga*, paradigma kritis yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara fundamental di dalam masyarakat. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Untuk itu urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap ideologi yang dominan ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidik adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Paradigma ini mengadopsi kesadaran kritis dengan cara melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketidakadilan yang mengejewartah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja serta bagaimana mentransformasikannya.

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah dirasakan urgensinya demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Untuk itu pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan harus dilakukan secara simultan agar perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan merupakan respon yang dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran pada skala obyektif terhadap eksistensi diri, posisi, dan juga masa depan individu ataupun kelompok. Oleh Fakih (1996) dikatakan bahwa pemberdayaan dianggap sebagai jalan yang penting menuju suatu perubahan. Lerman dan Porter (1990), Worrel dan Remer (1992) serta MacDonald (1993) mengemukakan pandangannya bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan kerangka proses : (1) individu dapat mengidentifikasi dan menyadari situasinya, dan alternatif-alternatif penyelesaian masalahnya ; (2) individu memiliki kekuatan-kekuatan personal untuk mengatasi dan mengendalikan situasi secara tidak langsung dan selanjutnya secara langsung ; dan (3) individu memiliki keberanian dan keterampilan untuk menghadapi situasi-situasi yang menekan dari luar. Disini selain menunjuk pada proses *empowerment* juga menunjuk pada hasil dari proses tersebut.

Pemberdayaan merupakan suatu proses dan sekaligus hasil dari proses tersebut. Pemberdayaan terwujud sebagai redistribusi kekuasaan, apakah antar negara, kelas, kasta, ras, gender atau individu. Selanjutnya tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk mengeliminir ideologi patriarki, yaitu dominasi laki-laki terhadap perempuan, mengubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidaksamaan sosial, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Proses dan pranata pendidikan, media, praktek dan sistem kesehatan, perundang-undangan dan peraturan, proses politik, model-model pembangunan dan pranata pemerintahan memberi kemungkinan bagi perempuan untuk memperoleh akses kepada penguasaan terhadap sumber-sumber material maupun pusat-pusat informasi yang berupa akses terhadap modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi. Maka proses pemberdayaan harus mempersoalkan semua struktur dan sumber kekuasaan tersebut. Namun Tan (1997) mengingatkan bahwa proses pemberdayaan perempuan haruslah demokratis dan bersifat membagi kekuasaan. Pemberdayaan perempuan berarti keinginan, bahkan tuntutan membagi kekuasaan (*sharing power*) dalam posisi setara (*equal*), representasi serta partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang menyangkut kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara kongkrit menurut Fadhil (2002) untuk mengatasi rendahnya kualitas sumberdaya perempuan dan kualitas peran perempuan maka diupayakan program-program antara lain :

- a. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pendidikan dan pelatihan.
- b. Penyiapan lingkungan yang lebih kondusif untuk kesetaraan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki.
- c. Pengembangan kebijakan pendidikan yang berperspektif gender.
- d. Pengarusutamaan gender dalam tingkat partisipasi, kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, dan pelaku pendidikan.
- e. Penyediaan sistem dukungan sosial bagi peningkatan kesempatan anak perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta kejuruan.
- f. Peningkatan pengetahuan perempuan mengenai penerapan teknologi tepat guna yang berperspektif gender.

Upaya perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah memerlukan kerjasama ketiga lingkungan (tripartit) yaitu lingkungan keluarga/masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan pemerintah daerah. Dari segi lingkungan keluarga/ masyarakat dapat dilihat melalui dukungan, kontribusi yang diberikan dan kontrol sosial masyarakat. Iklim ekonomi yang tidak memungkinkan sebuah keluarga menyekolahkan anaknya mengakibatkan mereka memprioritaskan laki-laki untuk sekolah jika dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan sikap sosial selalu membentuk stereotipe bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena tugas utamanya adalah mengurus pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami.

Kemudian upaya dari lingkungan sekolah menyangkut bagaimana bentuk sosialisasi, sistem penjangkaran, penyeleksian dan penerimaan input, maupun kebijakan-kebijakan alternatif yang ditawarkan. Sementara itu dari segi pemerintah daerah menyangkut kontrol pemerintah melalui kebijakan, program-program, maupun operasionalisasi di lapangan.

Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang sensitif gender tentunya akan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan. Beberapa kebijakan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan yang memastikan akses pendidikan, dalam pengertian melindungi perempuan dari diskriminasi pendidikan. Beberapa hal terkait dengan ini adanya bantuan finansial bagi yang membutuhkan, tidak mengalami proses pendidikan yang stereotip, serta penyediaan fasilitas yang memadai termasuk kualitas pengajar yang berperspektif gender.
- b. Kebijakan yang memperhatikan adanya persoalan budaya patriarki, yaitu pemberian sanksi terhadap institusi-institusi pendidikan yang mempraktekkan diskriminasi terhadap perempuan.
- c. Kebijakan yang berpihak pada ekonomi lemah, dalam kaitan ini memastikan akses pendidikan untuk semua golongan bahkan memperjuangkan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan menengah. Disamping itu sekolah swasta yang melayani keluarga mampu harus menyediakan proporsi tertentu dari keluarga yang tidak mampu.

- d. Kebijakan yang memperhatikan kurikulum dan teks-teks sekolah. Kebijakan ini memberi penekanan pada upaya untuk menghindari kurikulum yang bias gender, bahkan mewajibkan pendidikan gender di dalam setiap tingkat pendidikan.

B. Metode Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*) dan tuntas (*exhaustive*) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Singarimbun (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba memahami gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial tertentu, dalam konteks ini fenomena pendidikan dan gender. Sedangkan Vredenberg (1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan realitas sosial yang komplis dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya jenis penelitian ini berusaha menjawab apa penjelasan terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian.

Disamping itu juga digunakan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development = R & D*), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010). Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk berupa rekomendasi kebijakan baru tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain produk sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya.

Informan penelitian ini terdiri dari kalangan keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah. Untuk kalangan keluarga/masyarakat dipilih menggunakan teknik *snowball sampling* (Bogdan dan Biklen, (1998) ; Moleong (2000). Sementara informan penelitian dari kalangan sekolah dan pemerintah daerah dipilih secara *purposive*. Sedangkan pemilihan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan perolehan data dalam mencermati perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah seperti kondisi ekonomi masyarakat, budaya, serta kualifikasi sekolah

dalam hal ini sekolah yang berkualifikasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah dengan Standar Nasional, dan Sekolah Biasa. Berdasarkan hal tersebut, maka lokasi penelitian ditetapkan satu kabupaten dan satu kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang. Sementara itu sekolah yang menjadi sampel adalah : (1) SMA Negeri 10 Padang ; (2) SMA Negeri 2 Padang ; (3) SMA Negeri 7 Padang ; (4) SMA Negeri I Kecamatan Payakumbuh ; (5) SMA Negeri I Akabiluru ; dan (6) SMA Negeri I Kecamatan Harau.

Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) wawancara mendalam (*depth interview*) menggunakan pedoman wawancara ; dan (2) studi dokumentasi dengan menggunakan lembaran pencatat.

Data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi yang merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dan jawaban (Vredenberg, 1979). Penafsiran dan interpretasi data merupakan proses pemberian makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang digunakan dalam analisis data penelitian ini berpedoman kepada apa yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Reduksi data. Data yang terkumpul direduksi guna menajamkan analisis, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat sesuatu kesimpulan yang bermakna.
- b. Penyajian data, yang merupakan proses penggambaran dari keseluruhan kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga peneliti dapat memahami jawaban dari permasalahan yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dan diolah kemudian disimpulkan sesuai dengan klasifikasi data menuju suatu konfigurasi yang utuh. Jika terjadi kekurangan data atau kesalahan data yang diambil, maka dapat dilakukan proses ulang dengan tahapan yang sama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Disadari atau tidak, pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab tiga pihak (tripartit) yaitu pemerintah, sekolah dan masyarakat. Untuk mengetahui

bagaimana upaya yang dilakukan bagi peningkatan perluasan akses Perempuan terhadap pendidikan menengah, maka akan dikelompokkan ke dalam tiga hal tersebut.

a. Upaya yang dilakukan pemerintah.

Secara umum Dinas Pendidikan Sumatera Barat dalam memecahkan masalah yang dihadapi dunia pendidikan Sumatera Barat yaitu : (1) pemerataan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi usia sekolah 7-18 tahun, dengan prioritas pada program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ; (2) peningkatan mutu untuk seluruh satuan, jenis dan jenjang pendidikan, baik mutu input, mutu proses maupun mutu output (lulusan/tamatan), lembaga pendidikan ; dan (3) peningkatan manajemen pendidikan melalui pemberdayaan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi objektif yang dihadapi, ternyata upaya pemerataan dan perluasan akses menempuh pendidikan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti Perempuan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yaitu : *Pertama*, melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan sekaligus membangkitkan motivasi mereka untuk menapresiasi dunia pendidikan. *Kedua*, memberikan penyuluhan tentang *gender awareness* bagi masyarakat. Hal ini agar mereka bisa memahami program pemberdayaan Perempuan yang perlu dilakukan terutama dalam bidang pendidikan dan peningkatan taraf hidup Perempuan. *Ketiga*, meningkatkan anggaran pendidikan yang responsif gender. Dengan demikian, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga akan tercipta masyarakat berpendidikan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. *Keempat*, meningkatkan responsifitas *stakeholders* pendidikan terhadap isu-isu gender dalam pendidikan. *Kelima*, meningkatkan pemberian beasiswa secara proporsional untuk memasuki program studi yang bias gender terutama terhadap anak perempuan di lokasi penelitian yang bersekolah di sekolah-sekolah maskulin. *Keenam*, menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi agar dapat mengirimkan mahasiswa untuk kuliah kerja nyata yang bersifat tematik terutama dalam menanggulangi penanganan buta huruf, putus sekolah, ataupun mendapat pelatihan-pelatihan yang sifatnya *life skills*. *Ketujuh*, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dengan mengadakan pengawasan yang

bersifat independen. *Kedelapan*, membangun sarana-sarana yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan. *Kesembilan*, bekerjasama dengan berbagai dinas yang terkait untuk memudahkan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan seperti memperbaiki jalan, penyediaan transportasi dan lain-lain.

Untuk mendukung perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah terdapat beberapa kebijakan strategis yang dapat dilakukan yaitu :

1. Menghapus hambatan biaya (*cost barrier*) melalui pemberian BOS bagi semua siswa pada semua jenjang pendidikan. Disamping itu dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.
2. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, baik laki-laki maupun Perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholders* pendidikan seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, serta perguruan tinggi.
3. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar.
4. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Disamping itu juga dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.
5. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk desa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan.
6. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus di daerah terpencil serta mengimplementasikannya dalam berbagai program secara terpadu.
7. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta advokasi kepada masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan.

8. Melaksanakan advokasi bagi pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan pendidikan.
9. Memanfaatkan secara optimal sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif menggunakan modul atau tutorial.

Sehubungan dengan berbagai kebijakan yang dipaparkan sebelumnya, maka upaya untuk merealisasikannya dapat dilakukan melalui program sebagai berikut :

1. Pendanaan biaya operasional wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dalam kaitan ini BOS merupakan upaya mewujudkan “pendidikan dasar gratis” yang diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap. Tentunya hal ini juga perlu untuk dikaji kemungkinan penerapannya pada sekolah menengah atas.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan , baik laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran yang diharapkan berdampak pada peningkatan mutu.
3. Perluasan akses pendidikan melalui jalur nonformal sehingga memungkinkan menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu.
4. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Hal ini memberikan peluang besar bagi mereka untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung sesuai standar kompetensi keberaksaraan.
5. Pendidikan kecakapan hidup sebagai kebijakan strategis bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi.
6. Perluasan akses SMA?SMK dan SM terpadu, dalam hal ini lebih ditekankan pada partisipasi swasta.

b. Upaya yang dilakukan sekolah.

Sekolah juga berperan penting bagi perluasan akses Perempuan terhadap pendidikan menengah, terutama sekali terhadap iklim sekolah yang peka gender, muatan kurikulum sampai kepada sikap guru dalam berinteraksi dengan muridnya. Untuk itu upaya yang dilakukan sekolah adalah : *Pertama*, terlaksananya sosialisasi kepada siswa sekolah akan pentingnya pendidikan dan peningkatan akses

memperoleh pendidikan tanpa memandang sis gender. *Kedua*, terevisinya kurikulum dan materi buku pelajaran sekolah yang bias gender. *Ketiga*, menanamkan *gender awareness* kepada seluruh warga sekolah sehingga iklim sekolah dapat lebih responsif gender. *Keempat*, terlaksananya pendidikan yang responsif gender. *Kelima*, setiap sekolah harus mempunyai *data base* yang akan menyempurnakan statistik pendidikan yang berwawasan gender.

c. Upaya yang dilakukan masyarakat.

Menurut data BPS Susenas (2010), persentase Perempuan dalam tidak melanjutkan sekolah 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu 6,63% berbanding 1,3%. Umumnya penduduk Perempuan tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan menikah/mengurus rumah tangga. Disamping itu juga terdapat berbagai alasan lainnya yaitu bekerja/mencari nafkah, tidak ada biaya, merasa pendidikan cukup, malu karena ekonomi, sekolah jauh, dan cacat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat beranggapan pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu *langkah pertama* yang dilakukan adalah merubah *mindset* (reorientasi pemikiran) masyarakat bahwa sekolah itu juga merupakan tanggung jawab mereka. Apresiasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan akan memotivasi masyarakat untuk terus bersekolah. Reorientasi pemikiran atau pandangan masyarakat tersebut selanjutnya diarahkan kepada perluasan dan pemerataan akses penduduk dari sisi gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berpartisipasi untuk bersekolah tidak terlalu menunjukkan ketimpangan gender. Namun untuk pemerataan kesempatan memperoleh beasiswa, pemilihan jurusan, kesempatan melanjutkan pendidikan serta penduduk yang buta huruf masih menunjukkan kondisi marjinal bagi kaum Perempuan. Untuk itu *langkah kongkrit kedua* yang dilakukan adalah membangun iklim budaya yang kondusif bagi mengatasi permasalahan-permasalahan ketimpangan gender yang terjadi di lokasi penelitian. Pergeseran iklim budaya dan adat istiadat yang cenderung patriarkhis ke arah budaya yang lebih demokratis akan memberi peluang bagi peningkatan perluasan akses Perempuan terhadap pendidikan menengah.

Upaya *ketiga*, adalah melakukan gerakan bersama-sama, bersatu padu untuk membantu warga masyarakat yang karena kesulitan ekonomi (kondisi ekonomi) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Langkah kongkrit yang bisa dibentuk oleh masyarakat

adalah mengupayakan terbentuknya badan pemberi beasiswa di bawah pengawasan langsung lembaga independen bentukan masyarakat. Semacam badan filantropi pendidikan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, tidak hanya sekedar pendidikan menengah bahkan pendidikan tinggi. Lebih jauh lagi pendirian badan filantropi tidak hanya menyangkut pemberian dana, namun segala upaya yang dapat dicurahkan untuk membantu berbagai program dalam pelaksanaan pendidikan formal dan non formal. Hal ini tentu berbeda dengan dana-dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selanjutnya *langkah keempat*, turut membantu pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan *langkah kelima*, turut merencanakan, melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi program pendidikan di kabupaten/kota masing-masing. Selama ini peran yang telah digariskan dalam pasal 8 UU No.20 tahun 2003 ternyata Nampak sebagai sebuah kotak keterlibatan pasif dari masyarakat.

D. Penutup.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa strategi yang dilakukan untuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan menengah meliputi sinergitas antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat harus mereorientasikan persepsi, minat, motivasi dan harapan negatifnya terhadap pendidikan itu sendiri. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan responsive gender sehingga diharapkan pemerataan dan perluasan akses perempuan untuk bersekolah bias terus berlanjut. Sedangkan sekolah diharapkan mampu menciptakan iklim kondusif *gender awareness* dapat dijadikan pijakan untuk perluasan memperoleh pendidikan.

Sehubungan hal tersebut, maka beberapa hal yang perlu direkomendasikan sebagai berikut :

1. Setiap elemen masyarakat hendaknya bersama-sama turut memajukan pendidikan dengan mendukung berbagai program pemerintah khususnya pendidikan yang responsif gender.
2. Perlu didirikan sebuah lembaga semacam filantropi yang peduli tentang pendidikan guna menunjang perluasan akses pendidikan khususnya bagi

Perempuan seperti pemberian beasiswa, pembinaan bakat dan kecakapan hidup, dan sebagainya.

3. Peran pemerintah agar lebih optimal dalam menciptakan masyarakat dan sekolah yang responsif gender.

E. Daftar Pustaka.

Arivia, Gadis. (2002). "Kebijakan Publik dalam Pendidikan : Sebuah Kritik dengan Perspektif Gender" dalam *Jurnal Perempuan* 23. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.

Bogdan, RC. & Biklen, SK. (1998). *Qualitative Research in Education : An Introduction to Theory and Methods*. Boston : Allyn and Bacon.

Depdiknas. (2003). *Materi Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Materi Workshop Capacity Building Stakeholder Pendidikan di Kusuma Sahid, 20-22 Oktober 2003.

Fadhil, Jabir Khaidir. (2002). *Isu-isu Gender dalam Pembangunan*. Makalah disampaikan dalam Forum Pelatihan Metodologi Berperspektif Gender, yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang, 19-20 Juni 2002.

Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ihromi, Tapi Omas. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung : Alumni.

Lerman, Hannah & Natalie Porter. (1990). *Feminist Ethic in Psichoteraphy*. New York : Springer Publishing Co. Inc.

MacDonald, Mandy (ed.). (1993). *Gender Planning in Development Agencies Meeting the Challenge*. London : Oxfom Publication.

Miles, Mattew B. & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.

Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Moore, A. Hellen & Jane C. Ollenburger. (1996). *Sosiologi Wanita*. Jakarta : Rineke Cipta.

O'Neil, William. (2001). *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukezi, Keppi. (2002). *Teknik Analisis Gender dalam Kebijakan Pendidikan : Gender Analysis Pathway (GAP)*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Metodologi Penelitian Gender yang diselenggarakan oleh DIRBINLITABMAS-Dikti, Batu-Malang, 16-20 Juni 2002.
- Supriandi, Yusuf, dkk. (2001). *Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia*.
- Tan, Mely G. (1997). "Perempuan dan Pemberdayaan " dalam Smita Notosusanto, dkk. (Penyunting). (1997). *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta : Kerjasama Pascasarjana UI dengan Harian Kompas dan Penerbit Obor.
- Tilaar, H. A. R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Indonesia*. Bandung : PT. Rosdakarya.
- Vredenberg, J. (1979). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Worrell, Judith & Pam Remer. (1992). *Feminist Perspectives in Therapy : An Empowerment Models for Women*. New York : John Wiley and Sons.

Bidang Ilmu : ILMU SOSIAL

USUL PENELITIAN HIBAH BERSAING



**STRATEGI PERLUASAN AKSES PEREMPUAN
TERHADAP PENDIDIKAN MENENGAH
DI SUMATERA BARAT**

**DRS. SURYANEF, M.Si. (NIDN. 0006066407)
DRA. MARIA MONTESSORI, M.Ed., M.Si. (NIDN. 0002026011)**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG
OKTOBER 2012**

ABSTRAK

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan telah menjadi kebijakan utama di beberapa negara berkembang selama lebih tiga dekade terakhir ini, termasuk Indonesia. Berbagai regulasi telah dibuat demi memberikan jaminan hukum bagi persamaan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Namun realitasnya, statistik gender secara nasional menggambarkan adanya kesenjangan akses antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan. Demikian juga di Sumatera Barat. Temuan empiris menyebutkan tingginya angka buta huruf dan angka putus sekolah serta semakin tingginya tingkat pendidikan semakin sedikit jumlah perempuan yang dapat menamatkan pendidikan dibandingkan dengan laki-laki.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi perluasan akses perempuan di bidang pendidikan dari segi pandangan keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah. Disamping itu juga diharapkan dapat memberikan alternatif rumusan kebijakan bagi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah. Untuk itu tahun I penelitian ini hal yang dilakukan adalah : (1) memetakan strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah ; (2) menganalisis berbagai strategi perluasan akses yang dilakukan tripartite dan relevansinya dengan kebijakan terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan menengah ; dan (3) menghasilkan strategi dan rumusan alternatif kebijakan perluasan akses Perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat. Sementara itu pada tahun II penelitian diarahkan pada aktifitas berikut : (1) melakukan sosialisasi strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten/kota ; (2) melakukan analisis kritis bersama dengan pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan untuk merumuskan alternatif strategi dan kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah ; dan (3) dihasilkannya rumusan strategi dan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah. Adapun metode yang digunakan adalah metode survey dan *research and development (R&D)*. Sedangkan subjek penelitian meliputi lingkungan keluarga/masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan pemerintah daerah pada lokasi penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (*equity*) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas.

Untuk itu berbagai regulasi telah diciptakan, mulai dari pasal 31 UUD 1945 yang tidak membedakan hak untuk mengenyam pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan sampai kepada Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kesemua regulasi tersebut memberikan jaminan hukum bagi persamaan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Namun dalam realitasnya, statistik gender secara nasional maupun lokal menggambarkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya angka buta huruf, angka putus sekolah, dan menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dialami perempuan.

Di Sumatera Barat berdasarkan buku profil statistik dan indikator gender Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, terlihat bahwa selama kurun waktu 1996 – 2000 persentase penduduk perempuan berumur 10 – 44 tahun yang buta huruf relatif lebih besar dibanding laki-laki. Demikian juga dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tampak bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit jumlah perempuan yang dapat menamatkan pendidikan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kata lain akses perempuan untuk menjangkau/menamatkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diteliti strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah, maupun pemerintah daerah.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus pada tahun I bertujuan untuk : (1) memetakan strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah ; (2) menganalisis berbagai strategi perluasan akses yang dilakukan oleh tripartit dan relevansinya dengan kebijakan terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan menengah ; dan (3) menghasilkan strategi dan rumusan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat.

Selanjutnya pada tahun II bertujuan untuk : (1) melakukan sosialisasi strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan,

baik provinsi maupun kabupaten/kota ; (2) melakukan analisis kritis bersama dengan pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan untuk merumuskan alternatif strategi dan kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah ; dan (3) dihasilkannya rumusan strategi dan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah.

3. Urgensi Penelitian

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan telah menjadi kebijakan utama di beberapa negara berkembang selama lebih dari tiga dekade terakhir ini, termasuk Negara Indonesia. Jika dirunut ke belakang, perbincangan tentang pendidikan perempuan telah dimulai sejak tahun 1970 sejalan dengan lahirnya kritik di kalangan feminis terhadap model pembangunan yang merugikan perempuan. Kritik yang dilancarkan kaum feminis dunia tersebut, pada akhirnya melahirkan rekomendasi akan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Lima tahun kemudian diselenggarakan Konferensi Dunia I tentang perempuan di Mexico City pada tahun 1975 yang secara tegas merekomendasikan kepada seluruh negara anggota agar diberi kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi perempuan (Ihromi, 2000). Konferensi Dunia IV tentang perempuan yang berlangsung di Beijing tahun 1995 pada akhirnya menetapkan rencana program aksi di 12 bidang kritis, yang diantaranya adalah tentang perempuan dan pendidikan.

Di Indonesia secara normatif, negara telah mengambil peran penting untuk memajukan perempuan di segala bidang sebagaimana tertera dalam pasal 28c ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta budaya serta meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Landasan hukum lain yang memastikan terciptanya kesetaraan gender adalah UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan, program dan kelembagaan termasuk bidang pendidikan. Lebih khusus lagi UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah membuat beberapa paradigma baru yang lebih

memberi kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

Rangkaian kebijakan pendidikan yang responsif tersebut ternyata tidak memberikan kesetaraan dan keadilan dalam tataran empiris. Menurut Arivia (2002) persoalannya adalah dalam pelaksanaannya ternyata pendidikan bukanlah sesuatu yang bebas nilai, karena ia merupakan produk konstruksi sosial. Terlebih-lebih ada jenis kelamin dalam masyarakat yaitu perempuan yang tidak selalu diuntungkan akibat konstruksi sosial tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan lembaga sosial yang amat penting dalam membentuk dan kemudian memposisikan individu laki-laki dan perempuan pada golongan dan strata tertentu dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cenderung menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk ketidakadilan.

Statistik gender secara nasional menggambarkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Supriandi, dkk. (2001) dalam buku Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia menyebutkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) terlihat dominan rendah dalam usia 12 -18 tahun, sedangkan persentase perempuan yang buta huruf dua kali lebih besar dari laki-laki (13,85% dan 6,26%). Sementara jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan yang tidak menamatkan pendidikan dua kali lebih banyak bila dibandingkan dengan laki-laki yaitu 13,32% untuk perempuan dan 5,96% untuk laki-laki. Pendapat senada dikemukakan oleh Arivia (2002), rata-rata angka masuk sekolah perempuan adalah 49,18% sedangkan laki-laki 50,82% di tingkat sekolah dasar. Untuk tingkat SLTP angka masuk siswa perempuan turun menjadi 46,43% sedangkan laki-laki menjadi 53,56%. Sementara di tingkat SLTA angka masuk perempuan mencapai 41,45% sedangkan laki-laki 58,55%. Di perguruan tinggi, rata-rata angka masuk perempuan hanya 33,36%, sedangkan laki-laki 66,44%. Dengan demikian, angka-angka statistik partisipasi bersekolah masyarakat tersebut menunjukkan makin tinggi tingkat jenjang pendidikan maka makin rendah akses perempuan terhadap pendidikan.

Di Sumatera Barat berdasarkan profil statistik dan indikator gender Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, terlihat bahwa selama kurun waktu 1996 – 2000 juga memperkuat kenyataan bahwa rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan

apabila dibandingkan dengan laki-laki. Indikator lain yang dapat menggambarkan perluasan akses dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan adalah gambaran siswa putus sekolah (angka putus sekolah). Tabel berikut akan mengungkapkan jumlah siswa putus sekolah di Sumatera Barat untuk tahun ajaran 2006/2007.

Tabel 1 : Jumlah Siswa Putus Sekolah di Sumatera Barat Tahun Ajaran 2006/2007.

No.	Kabupaten/Kota	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
1.	Kab. Agam	142	1	192	69	130	13	41
2.	Kab. Pasaman	145	7	130	0	71	11	52
3.	Kab. Limapuluh Kota	242	2	258	33	127	18	23
4.	Kab. Solok	311	7	263	42	70	31	15
5.	Kab. Pariaman	197	0	304	18	86	18	63
6.	Kab. Pesisir Selatan	93	2	230	17	190	0	60
7.	Kab. Tanah Datar	176	0	142	84	136	29	49
8.	Kab. Swl/Sijunjung	131	0	127	22	77	0	41
9.	Kab. Mentawai	104	0	6	0	106	3	0
10.	Kab. Pasaman Barat	263	10	160	97	46	39	0
11.	Kab. Solok Selatan	47	0	18	5	12	0	15
12.	Kab. Dharmasraya	94	0	113	26	33	3	39
13.	Kota Bukittinggi	6	0	30	0	28	8	92
14.	Kota Padang	31	8	212	13	151	1	268
15.	Kota Padang Panjang	6	0	41	2	18	2	36
16.	Kota Sawahlunto	4	0	49	8	5	0	11
17.	Kota Solok	30	0	28	0	20	0	78
18.	Kota Payakumbuh	44	0	113	0	6	31	217
19.	Kota Pariaman	19	10	44	15	0	0	33
J u m l a h		2.085	47	2.460	451	1.312	207	1.133

Sumber : Data Statistik Subdin Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, 2008.

Dari data pada tabel 1 dapat dipahami bahwa : *Pertama*, kesempatan untuk memperoleh akses dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan ternyata belum merata menjangkau semua lapisan masyarakat yang menyebar pada daerah kota dan desa. Hal ini ditandai dengan jumlah siswa putus sekolah bervariasi pada masing-masing daerah. *Kedua*, jumlah siswa putus sekolah SMP dan sederajat ternyata lebih tinggi (dominan) bila dibandingkan dengan SD dan SMA. Hal ini berindikasi rendahnya akses siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Fenomena kesenjangan gender di bidang pendidikan sebagaimana terungkap sebelumnya, perlu segera mendapatkan upaya perbaikan yang komprehensif. Untuk itu penelitian ini penting dilakukan terlebih mengingat pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGs)* tahun 2015 diharapkan dapat mencapai tujuan. Satu

diantara berbagai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di segala bidang termasuk bidang pendidikan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan dalam suatu bangsa memegang peranan yang cukup penting. Perkembangan dan kemajuan sumberdaya pada suatu negara sangat bergantung pada hasil pendidikan yang memberikan kesempatan pada perkembangan manusia secara utuh (Tilaar, 1999). Dalam rangka membentuk manusia yang utuh, pendidikan di Indonesia hendaknya berupaya menjunjung tinggi adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama sebagai manusia dan mewujudkan kemampuannya untuk berperan aktif dalam pembangunan. Sementara itu keadilan gender merupakan proses yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Supaya proses untuk menjadi adil terwujud, diperlukan banyak langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara sosial dan menurut sejarah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkan. Keadilan gender dalam pendidikan secara tegas dicantumkan ke dalam Deklarasi Beijing tahun 1996 bahwa : "pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan, perkembangan dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (*equity*) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas." hal senada juga dapat ditemui dalam kebijakan pendidikan untuk semua (*educational for all*) yang telah disepakati di Dakar Singal. Beberapa isi dari kesepakatan tersebut berkaitan dengan pendidikan dan kesetaraan gender yakni : *Pertama*, menjamin bahwa menjelang 2015 semua anak khususnya perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik. *Kedua*, mencapai perbaikan 50% pada tingkat *literary* orang dewasa menjelang tahun 2015 terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. *Ketiga*, menghapus disparitis gender di bidang pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2015 dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan yang berkualitas (Depdiknas, 2003).

Penelitian Suryadi (dalam Sukesri, 2002) menyebutkan ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain dari gejala berbedanya akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, rendahnya angka partisipasi perempuan pada setiap studi, dan akses bagi partisipasi perempuan terhadap jurusan, ilmu dasar seperti fisika, kimia biologi dan teknologi industri masih rendah. Penelitian yang lebih intens tentang bias gender dalam pendidikan oleh Muthali'in (2001) yang secara umum menyimpulkan bias gender di sekolah tidak hanya ditemukan dalam proses pembelajaran (seperti buku pelajaran, media dan metoda, komponen-komponen proses belajar mengajar) tetapi juga tercermin dalam sistem sosial yang berlangsung di sekolah. Hal senada juga dikemukakan Fadhil (2002) yang menyebutkan bahwa dalam 210 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, 50,3% diantaranya perempuan dan dari jumlah tersebut, 65% berada pada usia produktif (15 – 60 tahun). Namun angka statistik secara umum menonjolkan bahwa kaum perempuan mendapat posisi yang kurang menguntungkan terutama dalam bidang pendidikan.

Bias gender dalam pendidikan ternyata merugikan satu peran gender yaitu perempuan. Padahal menurut Moore (1996) bila ditinjau dari teori fungsional peran sekolah dapat meningkatkan modal sosial laki-laki dan perempuan. Ternyata peningkatan modal sosial antara perempuan dan laki-laki tidak mengalami persamaan. Demikian juga dengan teori konflik. Berdasarkan teori ini direkomendasikan bahwa isi kurikulum mengandung bias kultural yang kadangkala mendistorsi perempuan dan dimensi-dimensi kehidupan yang penting buat perempuan. Di sisi lain dapat dijelaskan bahwa paling tidak ada tiga macam paradigma yang biasa mewarnai gerak langkah lembaga pendidikan. *Pertama*, paradigma konservatif yang menyebutkan ketidaksetaraan merupakan hukum alam dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari. Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius. Menurut paradigma ini menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari kesalahan mereka sendiri karena kelalaian mereka untuk belajar dan bekerja keras. *Kedua*, paradigma liberal yang menganggap bahwa persoalan ekonomi politik tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah,



pengadaan laboratorium atau komputer dan sebagainya, yang secara umum terisolasi dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya, dan represi politik yang ada dalam masyarakat. Pendidikan justru berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan, dan memproduksi nilai-nilai tata susila agar berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada umumnya membangun kesadaran dimana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau *given*, dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan (Fakih dalam O'Neil, 2001). *Ketiga*, paradigma kritis yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara fundamental di dalam masyarakat. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Untuk itu urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap ideologi yang dominan ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidik adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Paradigma ini mengadopsi kesadaran kritis dengan cara melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketidakadilan yang mengejutkan dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja serta bagaimana mentransformasikannya.

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah dirasakan urgensinya demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Untuk itu pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan harus dilakukan secara simultan agar perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan merupakan respon yang dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran pada skala obyektif terhadap eksistensi diri, posisi, dan juga masa depan individu ataupun kelompok. Oleh Fakih (1996) dikatakan bahwa pemberdayaan dianggap sebagai jalan yang penting menuju suatu perubahan. Lerman dan Porter (1990), Worrel dan Remer (1992) serta MacDonald (1993) mengemukakan pandangannya bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan kerangka proses : (1) individu dapat mengidentifikasi dan menyadari situasinya, dan alternatif-alternatif penyelesaian masalahnya ; (2) individu memiliki kekuatan-kekuatan personal untuk mengatasi dan mengendalikan situasi secara tidak langsung dan selanjutnya secara

langsung ; dan (3) individu memiliki keberanian dan keterampilan untuk menghadapi situasi-situasi yang menekan dari luar. Disini selain menunjuk pada proses *empowerment* juga menunjuk pada hasil dari proses tersebut.

Pemberdayaan merupakan suatu proses dan sekaligus hasil dari proses tersebut. Pemberdayaan terwujud sebagai redistribusi kekuasaan, apakah antar negara, kelas, kasta, ras, gender atau individu. Selanjutnya tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk mengeliminir ideologi patriarki, yaitu dominasi laki-laki terhadap perempuan, mengubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidaksamaan sosial, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Proses dan pranata pendidikan, media, praktek dan sistem kesehatan, perundang-undangan dan peraturan, proses politik, model-model pembangunan dan pranata pemerintahan memberi kemungkinan bagi perempuan untuk memperoleh akses kepada penguasaan terhadap sumber-sumber material maupun pusat-pusat informasi yang berupa akses terhadap modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi. Maka proses pemberdayaan harus mempersoalkan semua struktur dan sumber kekuasaan tersebut. Namun Tan (1997) mengingatkan bahwa proses pemberdayaan perempuan haruslah demokratis dan bersifat membagi kekuasaan. Pemberdayaan perempuan berarti keinginan, bahkan tuntutan membagi kekuasaan (*sharing power*) dalam posisi setara (*equal*), representasi serta partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang menyangkut kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara kongkrit menurut Fadhil (2002) untuk mengatasi rendahnya kualitas sumberdaya perempuan dan kualitas peran perempuan maka diupayakan program-program antara lain :

- a. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pendidikan dan pelatihan.
- b. Penyiapan lingkungan yang lebih kondusif untuk kesetaraan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki.
- c. Pengembangan kebijakan pendidikan yang berperspektif gender.
- d. Pengarusutamaan gender dalam tingkat partisipasi, kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, dan pelaku pendidikan.

- e. Penyediaan sistem dukungan sosial bagi peningkatan kesempatan anak perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta kejuruan.
- f. Peningkatan pengetahuan perempuan mengenai penerapan teknologi tepat guna yang berperspektif gender.

Upaya perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah memerlukan kerjasama ketiga lingkungan (tripartit) yaitu lingkungan keluarga/ masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan pemerintah daerah. Dari segi lingkungan keluarga/ masyarakat dapat dilihat melalui dukungan, kontribusi yang diberikan dan kontrol sosial masyarakat. Iklim ekonomi yang tidak memungkinkan sebuah keluarga menyekolahkan anaknya mengakibatkan mereka memprioritaskan laki-laki untuk sekolah jika dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan sikap sosial selalu membentuk stereotipe bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena tugas utamanya adalah mengurus pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami.

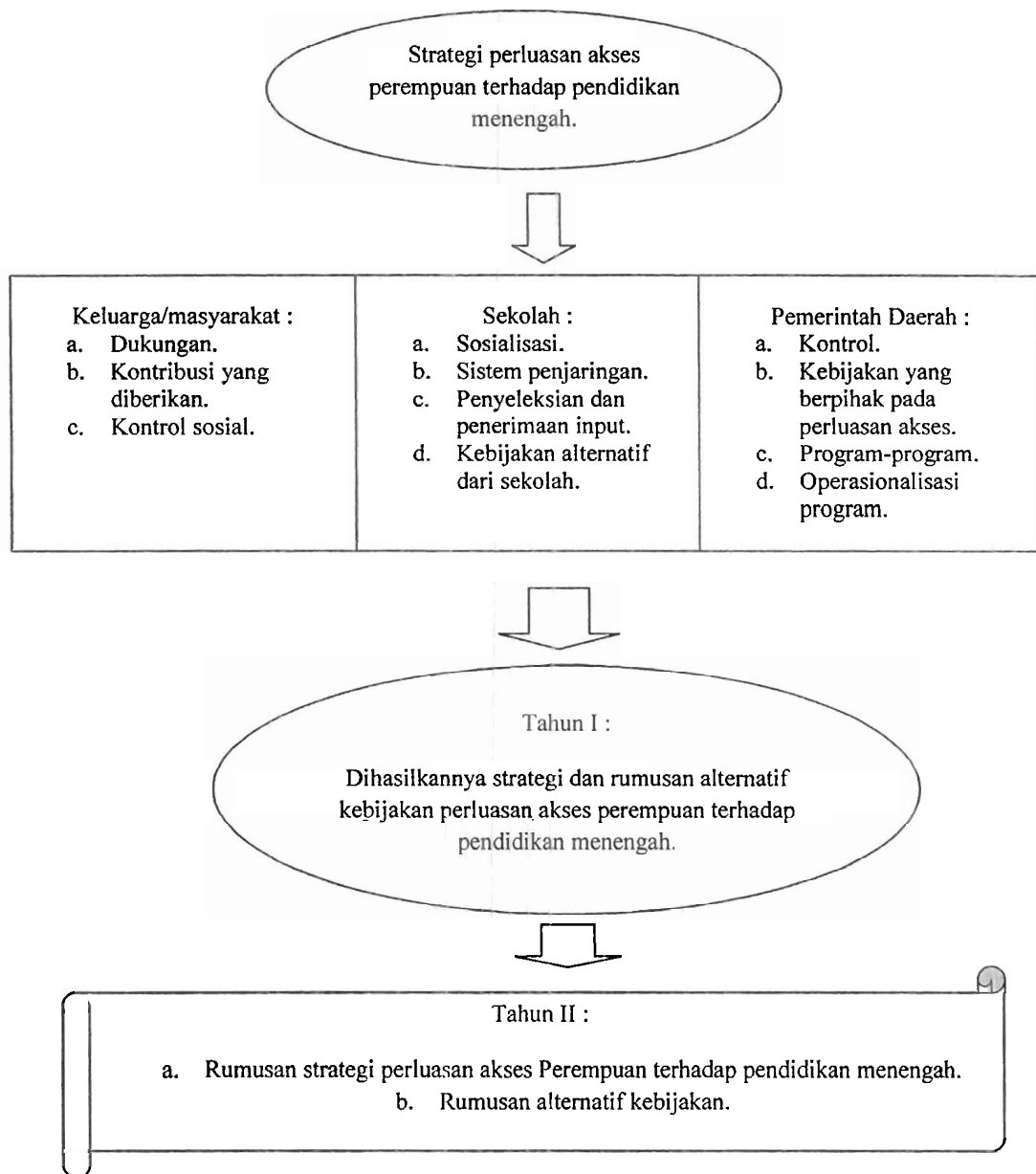
Kemudian upaya dari lingkungan sekolah menyangkut bagaimana bentuk sosialisasi, sistem penjangkaran, penyeleksian dan penerimaan input, maupun kebijakan-kebijakan alternatif yang ditawarkan. Sementara itu dari segi pemerintah daerah menyangkut kontrol pemerintah melalui kebijakan, program-program, maupun operasionalisasi di lapangan.

Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang sensitif gender tentunya akan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan. Beberapa kebijakan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan yang memastikan akses pendidikan, dalam pengertian melindungi perempuan dari diskriminasi pendidikan. Beberapa hal terkait dengan ini adanya bantuan finansial bagi yang membutuhkan, tidak mengalami proses pendidikan yang stereotip, serta penyediaan fasilitas yang memadai termasuk kualitas pengajar yang berperspektif gender.
- b. Kebijakan yang memperhatikan adanya persoalan budaya patriarki, yaitu pemberian sanksi terhadap institusi-institusi pendidikan yang mempraktekkan diskriminasi terhadap perempuan.

- c. Kebijakan yang berpihak pada ekonomi lemah, dalam kaitan ini memastikan akses pendidikan untuk semua golongan bahkan memperjuangkan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan menengah. Disamping itu sekolah swasta yang melayani keluarga mampu harus menyediakan proporsi tertentu dari keluarga yang tidak mampu.
- d. Kebijakan yang memperhatikan kurikulum dan teks-teks sekolah. Kebijakan ini memberi penekanan pada upaya untuk menghindari kurikulum yang bias gender, bahkan mewajibkan pendidikan gender di dalam setiap tingkat pendidikan.

Berkaitan dengan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut :



BAB III : METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*) dan tuntas (*exhaustive*) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Singarimbun (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba memahami gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial

tertentu, dalam konteks ini fenomena pendidikan dan gender. Sedangkan Vredenberg (1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan realitas sosial yang komplis dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya jenis penelitian ini berusaha menjawab apa penjelasan terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian.

Disamping itu juga digunakan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development = R & D*), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010). Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk berupa rekomendasi kebijakan baru tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain produk sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya.

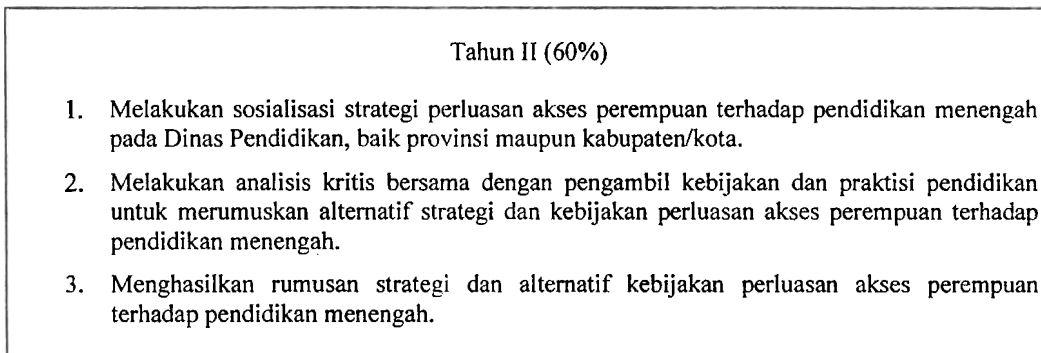
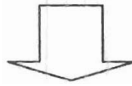
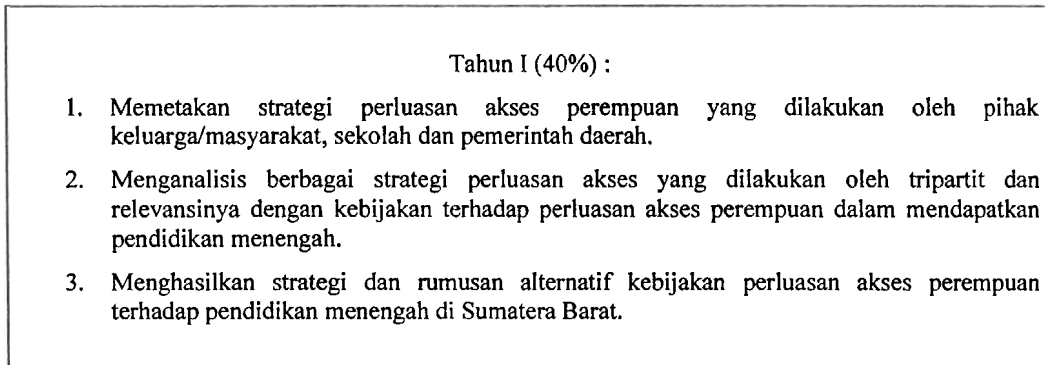
Informan penelitian ini terdiri dari kalangan keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah. Untuk kalangan keluarga/masyarakat dipilih menggunakan teknik *snowball sampling* (Bogdan dan Biklen, (1998) ; Moleong (2000). Sementara informan penelitian dari kalangan sekolah dan pemerintah daerah dipilih secara *purposive*. Sedangkan pemilihan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan perolehan data dalam mencermati perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah seperti kondisi ekonomi masyarakat, budaya, serta letak sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka lokasi penelitian ditetapkan satu kabupaten dan satu kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang. Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) wawancara mendalam (*depth interview*) menggunakan pedoman wawancara ; dan (2) studi dokumentasi dengan menggunakan lembaran pencatat. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk matriks berikut :

No.	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah dalam perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah.	a. Keluarga/masyarakat. b. Sekolah (guru, kepala sekolah, siswa, dan komite sekolah). c. Pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dan UPTD Pendidikan Kecamatan).	Wawancara dan studi dokumentasi.	Pedoman wawancara dan lembaran pencatat.
2.	Strategi dan kebijakan alternatif bagi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah.	a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan UPTD Pendidikan Kecamatan. b. Masyarakat. c. Sekolah. d. Siswa.	Wawancara.	Pedoman wawancara.

Data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi yang merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dan jawaban (Vredenberg, 1979). Penafsiran dan interpretasi data merupakan proses pemberian makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang digunakan dalam analisis data penelitian ini berpedoman kepada apa yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Reduksi data. Data yang terkumpul direduksi guna menajamkan analisis, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat sesuatu kesimpulan yang bermakna.
- b. Penyajian data, yang merupakan proses penggambaran dari keseluruhan kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga peneliti dapat memahami jawaban dari permasalahan yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dan diolah kemudian disimpulkan sesuai dengan klasifikasi data menuju suatu konfigurasi yang utuh. Jika terjadi kekurangan data atau kesalahan data yang diambil, maka dapat dilakukan proses ulang dengan tahapan yang sama.

Kemudian dari segi alur penelitian setiap tahunnya dapat digambarkan sebagai berikut :



BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN.

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun. Tahun pertama dimulai setelah Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) yang diperkirakan sekitar bulan April, dan pelaksanaannya berakhir bulan November. Untuk lebih lengkapnya jadwal pelaksanaan penelitian tertera pada matrik berikut :

TAHUN I

No.	Uraian Kegiatan	Bulan ke								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persiapan penelitian.									
	a. Pengurusan izin.	■								
	b. Penyusunan instrumen.	■								
2.	Pelaksanaan penelitian.		■							
	a. Pengumpulan data lapangan.		■	■						
	b. Analisis data.			■	■	■				
	c. Desain rumusan alternatif kebijakan dan modul pemberdayaan politik perempuan.					■	■	■		
3.	Penyusunan laporan.									
	a. Menyusun laporan.									
	b. Seminar hasil.								■	
	c. Revisi laporan.								■	■
	d. Penulisan artikel publikasi.									■

Apabila penelitian dilanjutkan pada tahun kedua maka direncanakan sebagaimana yang dilaksanakan pada tahun pertama. Untuk lebih jelasnya terungkap pada matrik berikut :

TAHUN II

No.	Uraian Kegiatan	Bulan ke								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persiapan penelitian.									
	Pengurusan izin.	■								
2.	Pelaksanaan penelitian.		■							
	a. Pengumpulan data lapangan melalui FGD untuk uji terbatas desain.		■							
	b. Revisi desain model oleh peneliti.			■	■					
	c. Validasi desain oleh pakar.				■	■				
	d. Revisi desain model oleh peneliti.					■	■			
	e. Evaluasi desain dan rumusan alternatif kebijakan dan modul pemberdayaan politik perempuan melalui review pakar							■	■	
3.	Penyusunan laporan.									
	a. Menyusun laporan dan modul..								■	
	b. Seminar hasil.								■	
	c. Revisi laporan dan modul.								■	■
	d. Penulisan artikel publikasi.									■

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis. (2002). "Kebijakan Publik dalam Pendidikan : Sebuah Kritik dengan Perspektif Gender" dalam *Jurnal Perempuan* 23. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Bogdan, RC. & Biklen, SK. (1998). *Qualitative Research in Education : An Introduction to Theory and Methods*. Boston : Allyn and Bacon.
- Depdiknas. (2003). *Materi Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Materi Workshop Capacity Building Stakeholder Pendidikan di Kusuma Sahid, 20-22 Oktober 2003.
- Fadhil, Jabir Khaidir. (2002). *Isu-isu Gender dalam Pembangunan*. Makalah disampaikan dalam Forum Pelatihan Metodologi Berperspektif Gender, yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang, 19-20 Juni 2002.
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ihromi, Tapi Omas. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung : Alumni.
- Lerman, Hannah & Natalie Porter. (1990). *Feminist Ethic in Psichoteraphy*. New York : Springer Publishing Co. Inc.
- MacDonald, Mandy (ed.). (1993). *Gender Planning in Development Agencies Meeting the Challenge*. London : Oxfom Publication.
- Miles, Mattew B. & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moore, A. Hellen & Jane C. Ollenburger. (1996). *Sosiologi Wanita*. Jakarta : Rineke Cipta.
- O'Neil, William. (2001). *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukesi, Keppi. (2002). *Teknik Analisis Gender dalam Kebijakan Pendidikan : Gender Analysis Pathway (GAP)*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Metodologi

Penelitian Gender yang diselenggarakan oleh DIRBINLITABMAS-Dikti, Batu-Malang, 16-20 Juni 2002.

Supriandi, Yusuf, dkk. (2001). *Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia*.

Tan, Mely G. (1997). "Perempuan dan Pemberdayaan " dalam Smita Notosusanto, dkk. (Penyunting). (1997). *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta : Kerjasama Pascasarjana UI dengan Harian Kompas dan Penerbit Obor.

Tilaar, H. A. R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Indonesia*. Bandung : PT. Rosdakarya.

Vredenberg, J. (1979). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

Worrell, Judith & Pam Remer. (1992). *Feminist Perspectives in Therapy : An Empowerment Models for Women*. New York : John Wiley and Sons.

REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp x 1000)	
		Tahun I	Tahun II
1.	Gaji dan Upah.	12.000,-	15.000,-
2.	Bahan habis pakai dan kegiatan penunjang.	14.250,-	19.650,-
3.	Perjalanan.	7.750,-	7.850,-
4.	Pengolahan data, penyusunan laporan, seminar hasil, dan publikasi ilmiah.	6.000,-	7.500,-
Total Anggaran		40.000,-	50.000,-